




KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Government Finance Statistics

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN (LKPK)
DAN LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH (LSKP)

TINGKAT WILAYAH KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2024 *PRELIMINARY*

 Gunung Halau-halau

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH
dan
LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2024**

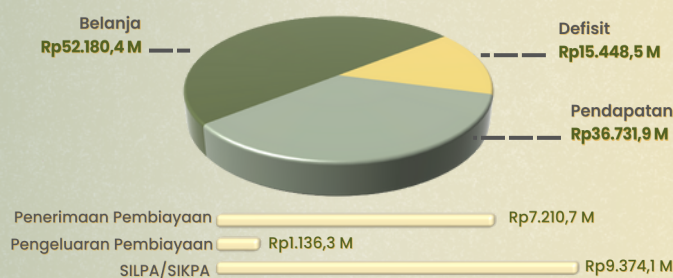
DASHBOARD GOVERNMENT FINANCE STATISTICS

TINGKAT WILAYAH KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 PRELIMINARY

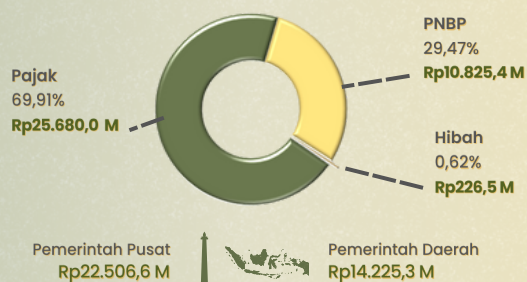
LKPK - TW Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian - Tingkat Wilayah

Laporan yang disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW) dalam suatu periode.

Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian



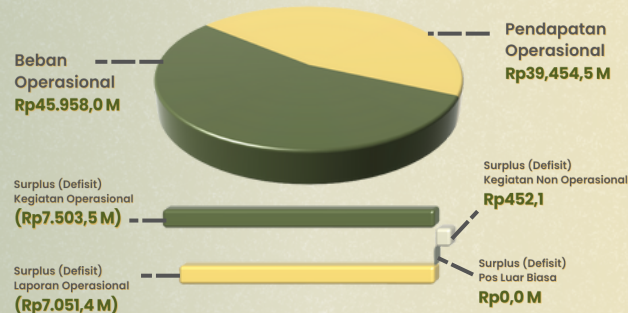
Komposisi Pendapatan Konsolidasian



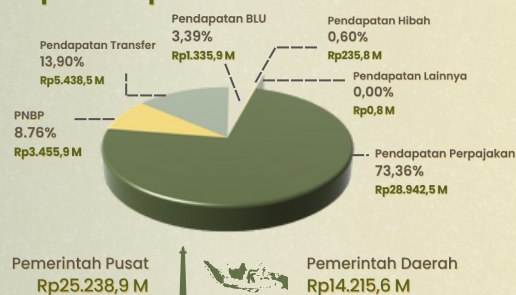
Komposisi Belanja Konsolidasian



Laporan Operasional Konsolidasian



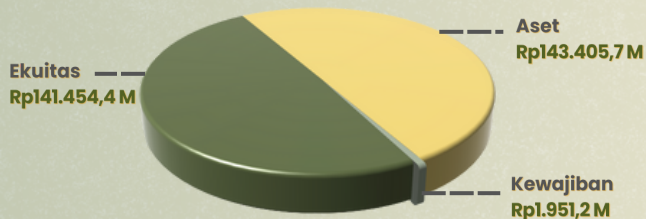
Pendapatan Operasional Konsolidasian



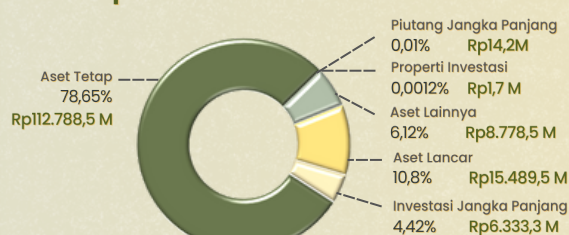
Beban Operasional Konsolidasian



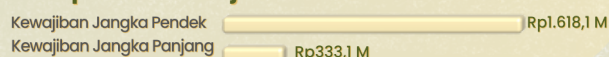
Neraca Konsolidasian



Komposisi Aset Konsolidasian



Komposisi Kewajiban Konsolidasian



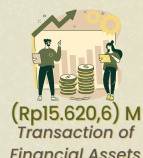
DASHBOARD GOVERNMENT FINANCE STATISTICS

TINGKAT WILAYAH KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024 PRELIMINARY

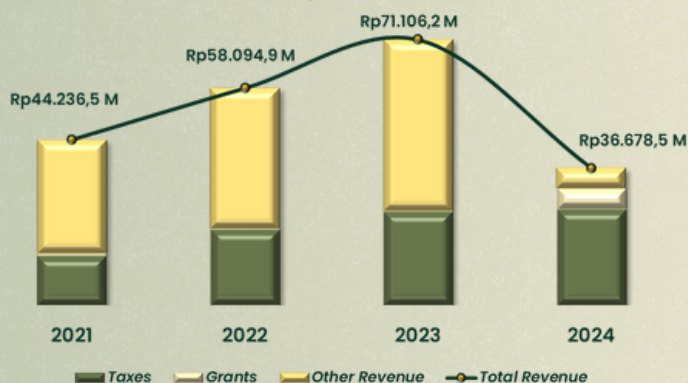
LSKP - TW Laporan Statistik Keuangan Pemerintah - Tingkat Wilayah

Laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah di wilayah kerja Kantor Wilayah DJPb selama suatu periode.

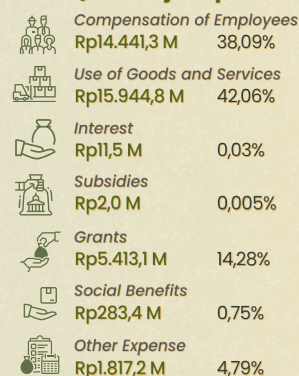
Laporan Operasional Statistik



Tren Revenue (Pendapatan)



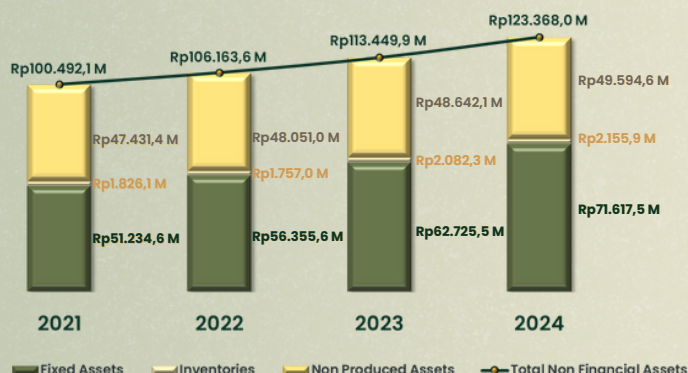
Komposisi Expense (Beban/Belanja Operasional)



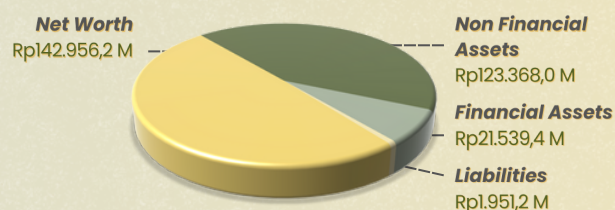
Komposisi Assets



Tren Non Financial Assets



Neraca Statistik



Komposisi Liabilities



Komposisi Net Worth





DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
<i>Flash Report</i>	1
1. Gambaran Umum Kondisi Keuangan LKPP-TW, LKPDK-TW, LKPK-TW, dan LSKP-TW Provinsi Kalimantan Selatan Periode <i>Preliminary</i> Tahun 2024	1
2. Perkembangan Kondisi Keuangan Berdasarkan Analisis Laporan Keuangan	3
3. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang Berdampak pada Kinerja Keuangan dan Statistik	5
4. <i>Resume</i> Pelaksanaan Kegiatan.....	6
5. Kesimpulan dan Rekomendasi	8
Daftar Lampiran	10
<i>Face Laporan</i>	11
Metadata.....	38
Analisis Rasio Keuangan	41



FLASH REPORT LAPORAN GFS STRATEGIS TINGKAT WILAYAH PERIODE PRELIMINARY TAHUN 2024

1. Gambaran Umum Kondisi Keuangan LKPP-TW, LKPDK-TW, LKPK-TW, dan LSKP-TW Provinsi Kalimantan Selatan Periode Preliminary Tahun 2024

a. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW)

Kinerja realisasi pendapatan Pemerintah Pusat pada periode Tahun 2024 sebesar Rp22,51 triliun tercatat lebih kecil 0,84% dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2023. Seluruh komponen Pendapatan mengalami peningkatan, kecuali Pendapatan PNBP Lainnya yang mengalami penurunan 15,87% dan Pajak Dalam Negeri yang menurun tipis sebesar 0,16%. Penurunan realisasi Pendapatan utamanya dipengaruhi Pajak Penghasilan sebesar Rp1,30 triliun atau 11,92% (yoy). Di sisi lain, Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp1,51 triliun atau 25,94% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2024 sebesar Rp41,25 triliun meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,19%. Seluruh pos belanja mengalami peningkatan realisasi, kecuali Belanja Modal yang mengalami penurunan sebesar 16,04% (yoy), Transfer Dana Bagi Hasil sebesar 4,78%, dan Dana Transfer Khusus Fisik dengan penurunan 3,20%. Posisi aset di neraca LKPP per 31 Desember 2024 sebesar Rp52,56 triliun mengalami kenaikan sebesar 5,85% dibandingkan dengan posisi neraca per 31 Desember 2023. Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp18,08 triliun. Sementara itu, jumlah kewajiban sebesar Rp480,55 miliar mengalami penurunan signifikan sebesar 61,74% dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Hal ini merupakan hasil dari penurunan kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW)

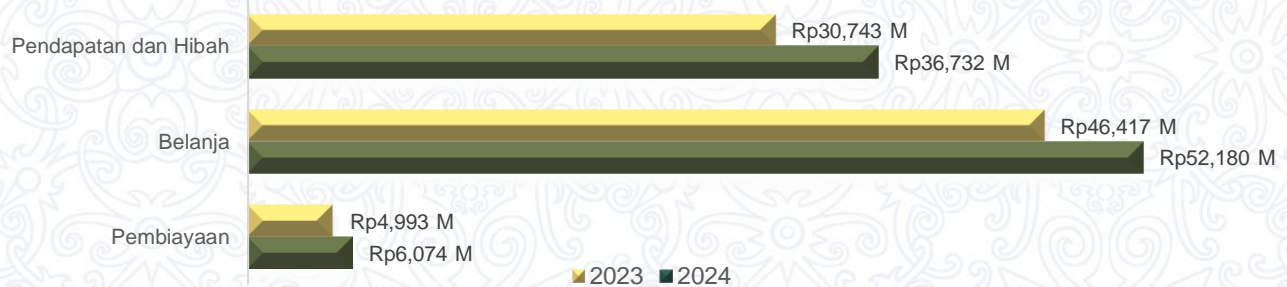
Di sisi LKPDK-TW, pendapatan daerah konsolidasian sampai dengan 31 Desember 2024 menunjukkan pertumbuhan positif. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp44,54 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 27,75% (yoy). Komponen pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah secara nominal mencapai Rp8,52 triliun, Pendapatan Transfer sebesar Rp35,75 triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp267,56 miliar. Kontribusi Pendapatan Transfer masih dominan terhadap pendapatan daerah pada APBD. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan APBD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pendapatan transfer untuk mendanai pembangunan daerah di Kalimantan Selatan masih tinggi. Jumlah PAD pada Tahun 2024 mengalami tren positif tipis dengan peningkatan 9,04% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kenaikan terbesar terdapat pada komponen Retribusi Daerah, yaitu sebesar 662,30% (yoy) atau senilai Rp975,88 miliar. Kenaikan Retribusi Daerah tersebut utamanya berasal dari peningkatan signifikan (yoy) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar 4.804,02% atau senilai Rp915,17 miliar dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar 1.369,15% atau senilai Rp34,34 miliar. Belanja Daerah juga menunjukkan kinerja yang positif dengan realisasi Rp37,47 triliun dan mengalami peningkatan sebesar 25,47% dari periode yang sama Tahun 2023. Realisasi Transfer ke Daerah juga mengalami peningkatan dengan realisasi Rp3,77 triliun atau meningkat 25,66% (yoy).



c. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW)

Hasil konsolidasi dari LKPP-TW dan LKPD-K-TW menghasilkan realisasi LKPK-TW Provinsi Kalimantan Selatan. Pendapatan konsolidasian tingkat wilayah Kalimantan Selatan mencapai Rp36,73 triliun. Sebesar 69,91% dari realisasi pendapatan merupakan kontribusi dari Pendapatan Perpajakan, terutama Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri. Secara nominal, realisasi komponen pendapatan yang bersumber dari Perpajakan mencapai Rp25,68 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp10,83 triliun. Nilai pendapatan konsolidasian mengalami peningkatan sebesar 19,45% (yoy) dengan seluruh komponen pendapatan yang meningkat, kecuali Pendapatan BLU dan BLUD. Proporsi tertinggi Pendapatan Perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp9,60 triliun, disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp7,34 triliun, dan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp2,61 triliun. Realisasi Belanja konsolidasian juga menunjukkan akselerasi dengan nilai realisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp52,18 triliun. Realisasi terbesar merupakan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp16,57 triliun. Berikut merupakan grafik perbandingan komposisi LRA LKPK-TW Tahun 2024 dengan periode Tahun 2023.

Grafik 1. Perbandingan Komposisi LRA LKPK-TW Kalimantan Selatan



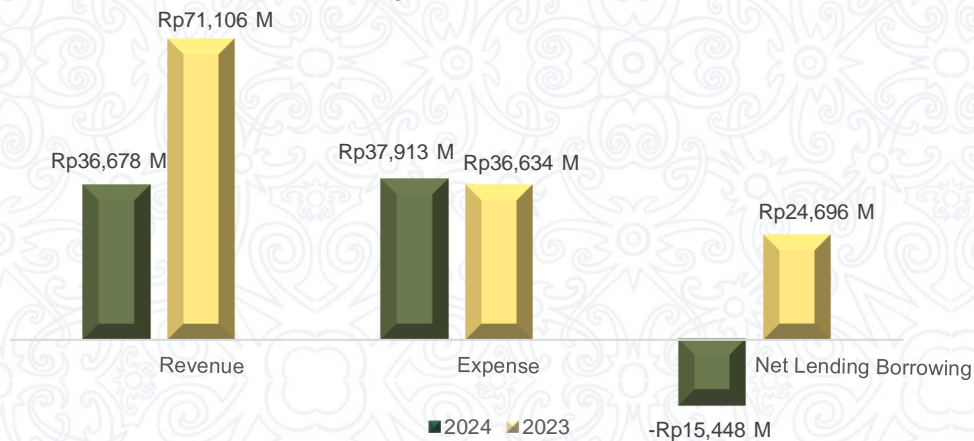
Sumber: Diolah dari LRA LKPK *Preliminary* Tahun 2023 dan 2024 Prov. Kalimantan Selatan

d. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW)

LSKP-TW Kalimantan Selatan menunjukkan pendapatan Tahun 2024 sebesar Rp36,68 triliun atau secara *year-on-year* mengalami penurunan sebesar 48,42%. Penurunan tersebut karena dikeluarkannya *dropping* dana transfer dari penghitungan pendapatan yang mempengaruhi kekayaan bersih pemerintah umum. Pada periode sebelumnya, *dropping* dana transfer masuk menambah nilai Pendapatan Lainnya. Untuk itu, seluruh komponen realisasi pendapatan mengalami peningkatan dari periode yang sama tahun sebelumnya, kecuali Pendapatan Lainnya. Sementara itu, beban statistik tercatat Rp37,91 triliun atau meningkat sebesar 3,49% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Penggunaan Barang dan Jasa menjadi komponen beban terbesar, yaitu sebesar Rp15,94 triliun sampai dengan 31 Desember 2024. Dari sisi neraca statistik, *Net Worth* atau Kekayaan Bersih tercatat sebesar Rp142,96 triliun, yang terdiri atas Aset Non Keuangan sebesar Rp123,38 triliun dan Aset Keuangan sebesar Rp21,54 triliun. Nilai *Net Worth* per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 11,54% dibandingkan posisi per 31 Desember 2023. Berikut merupakan grafik perbandingan komposisi LO LSKP-TW Tahun 2024 dengan periode Tahun 2023. Nilai *Net Lending Borrowing* senilai minus Rp15,45 triliun merupakan nilai dari pendapatan dikurangi beban dan investasi neto aset non keuangan. Nilai ini juga sama dengan total pembiayaan.



Grafik 2. Perbandingan Komposisi LO LSKP-TW Kalimantan Selatan



Sumber: Diolah dari LRA LKPK Tahun 2024 dan 2023 Prov. Kalimantan Selatan

2. Perkembangan Kondisi Keuangan Berdasarkan Analisis Laporan Keuangan

a. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)

Rasio Solvabilitas Jangka Pendek pada LKPK Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2024 adalah sebesar 957,27%, yang berasal dari perhitungan aset lancar sebesar Rp15,49 triliun dan kewajiban jangka pendek sebesar Rp1,62 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah di tingkat konsolidasian memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, di mana ketersediaan aset lancar sebesar 9 kali lebih tinggi daripada kewajiban jangka pendeknya. Sementara itu, Rasio Solvabilitas Jangka Panjang adalah sebesar 43.047,90%, yang berasal dari perhitungan total aset sebesar Rp143,41 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp333,13 miliar. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah di tingkat konsolidasian sangat baik untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka panjangnya.

b. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 18,15% dan 21,06%. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Tahun 2024 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya karena terdapat penurunan PAD, khususnya pada pos Lain-lain PAD yang Sah.

2. Rasio Solvabilitas Anggaran

Rasio Solvabilitas Anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 140,85% dan 126,70%. Rasio Solvabilitas Anggaran menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka menutupi belanja pemerintah. Nilai di atas 100% tersebut mencerminkan bahwa Pendapatan Pemerintah Daerah lingkup provinsi Kalimantan Selatan mampu menutupi belanja Pemerintah selama periode anggaran berkenaan.

3. Rasio Solvabilitas Layanan

Rasio Solvabilitas Layanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 sebesar 11.210.172 yang berarti untuk setiap kebutuhan pelayanan menurut fungsi dan jenis



pelayanan yang akan diterima oleh per 1 orang penduduk di wilayah layanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat dipenuhi/dijamin dengan nilai aset yang digunakan untuk pelayanan publik senilai Rp11.210.172. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp9.873.490.

4. Rasio Solvabilitas Operasional

Rasio Solvabilitas Operasional ini dihitung dengan membandingkan Total Pendapatan Operasional dikurangi Pendapatan Transfer DAK LO yang kemudian dibagi dengan Beban Operasional. Rasio Solvabilitas Operasional pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 117,41% dan 110,68%. Secara umum, nilai tersebut mencerminkan bahwa Pendapatan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat menutupi belanja operasional selama periode anggaran Tahun 2024.

5. Rasio Fleksibilitas Keuangan

Rasio Fleksibilitas Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 16,85% dan 10,07%. Nilai Rasio Fleksibilitas Keuangan yang bernilai positif tersebut mencerminkan bahwa pendapatan yang dikumpulkan setelah dikurangi DAK dapat mencukupi untuk membiayai kebutuhan utama, yaitu pembayaran beban operasional dan pembayaran pokok utang. Hal ini disebabkan beban operasional lebih besar dari pendapatan operasional setelah dikurangi dengan pendapatan transfer DAK dan pembayaran pokok kewajiban.

c. Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

1. Analisis Keseimbangan Fiskal

Analisis Keseimbangan Fiskal menunjukkan bahwa kesinambungan fiskal Pemerintah Konsolidasian terjaga dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat melalui indikator surplus/defisit atau dalam statistik disebut sebagai Keseimbangan Operasi Neto/Bruto (*Net/Bruto Operating Balance*). Perubahan kekayaan selama transaksi berjalan menunjukkan peningkatan di seluruh tingkatan pemerintahan apabila dibandingkan dengan periode Tahun 2023, kecuali Pemerintah Pusat yang mengalami penurunan akibat dikeluarkannya *dropping* dana transfer dari komponen pendapatan Pemerintah Pusat. Nilai *Net Operating Bruto* (NOB) di tingkat Pemerintah Umum yaitu sebesar minus Rp1,23 triliun.

2. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya

a. Pajak Langsung (*Direct Taxes*)

Pajak Langsung (*Direct Taxes*) pada lingkup Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp12,46 triliun. Pajak Langsung sebagian besar berupa *Taxes on income, profits, and capital gain*, yaitu sebesar 77,08%. Pajak Langsung Lainnya berupa Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Langsung (*Direct Taxes*) mengalami peningkatan pada Tahun 2024 sebesar Rp1,04 triliun atau 9,12% dibanding Tahun 2023. Peningkatan tersebut berasal peningkatan penerimaan pajak pada tingkatan Pemerintah Pusat.

b. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Taxes*)

Pajak Tidak Langsung (*Indirect Taxes*) pada lingkup Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp13,21 triliun, mengalami penurunan tipis sebesar Rp195,60 miliar atau 1,46% dibandingkan Tahun 2023, yaitu sebesar Rp13,41 triliun. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Taxes*) sebagian besar berupa *Taxes on Good Services* yaitu mencapai 94,88%



dari total Pajak Tidak Langsung. Pajak Tidak Langsung pada Pemerintah Provinsi didominasi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan pada Pemkab/Pemkot didominasi oleh Pajak Penerangan Jalan.

c. Pajak Modal (*Capital Taxes*)

Pajak Modal (*Capital Taxes*) pada lingkup Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp0 mengalami penurunan sebesar Rp210,78 miliar atau sebesar 100,00% dibandingkan Tahun 2023. Pajak Modal (*Capital Taxes*) Tahun 2023 terdapat pada Pemkab/Pemkot yaitu berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara itu, pada periode *Preliminary* Tahun 2024 ini terdapat perubahan *mapping* sehingga BPHTB tidak termasuk dalam penghitungan Pajak Modal.

d. Belanja Konsumsi Final Pemerintah (*Government Final Consumption Expenditure*)

Belanja Konsumsi Final Pemerintah pada lingkup Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp28,63 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp4,13 triliun atau 16,87% dibandingkan Tahun 2023. Peningkatan Belanja Konsumsi Final Pemerintah terbesar disumbang oleh Penggunaan Barang dan Jasa (*Use of Goods and Services*), yaitu meningkat sebesar Rp2,66 triliun atau 20,03% (yoy).

e. Tabungan Bruto (*Gross Saving*)

Tabungan Bruto (*Gross Saving*) pada lingkup Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp119,52 triliun mengalami penurunan sebesar Rp34,84 triliun atau 100,34% dibandingkan Tahun 2023. Hal tersebut mencerminkan perlunya peningkatan kemampuan pemerintah untuk menghasilkan Tabungan Bruto yang dapat dialokasikan untuk dilakukan investasi melalui optimalisasi pembiayaan.

3. Analisis Indikator Pembiayaan

Total Pembiayaan (*Total Financing*) merupakan nilai yang sama dengan *Net Lending/Net Borrowing*. Nilai *Net Lending* Tahun 2024 pada LO Statistik menunjukkan nilai minus Rp15,45 triliun. Dengan demikian, nilai *Net Lending* mengalami penurunan sebesar Rp40,14 triliun atau 162,55% dibandingkan dengan Tahun 2023, yaitu sebesar Rp24,70 triliun. Penurunan nilai *Net Lending* dibandingkan tahun sebelumnya merupakan efek dari pengeluaran pendapatan *dropping* dana transfer dari komposisi Pendapatan Lainnya pada tingkat Pemerintah Pusat.

3. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang Berdampak pada Kinerja Keuangan dan Statistik

a. Permasalahan Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Pusat

Kebijakan akuntansi dari pengelola akuntansi unit eselon 1 terkait implementasi PSAP 17 Properti Investasi belum sepenuhnya ada sehingga UAPPA-W dan satker di bawahnya belum dapat memasukkan PSAP 17 Properti Investasi tersebut dalam laporan keuangannya. Pada lingkup wilayah Kalimantan Selatan, baru terdapat 2 (dua) Badan Anggaran (BA) yang melakukan pencatatan aset Properti Investasi, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (004) dan Kementerian Perhubungan (022).

b. Permasalahan Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Daerah

1. Aplikasi SIPD RI belum sepenuhnya menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah (khususnya LRA per Fungsi). Fitur yang tersedia masih pada tahap penganggaran sehingga proses penatausahaan dan akuntansi pelaporan belum dapat dilakukan. Untuk itu, dibutuhkan *update* sistem aplikasi untuk mengakomodasi penyusunan LRA per Fungsi.



Dari 14 (empat belas) Pemerintah Daerah lingkup Kalimantan Selatan, 13 (tiga belas) di antaranya menyusun LRA per Fungsi dengan bantuan aplikasi lain yang digunakan secara paralel dengan SIPD RI. Sedangkan satu Pemda, yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, masih belum dapat menyampaikan LRA per Fungsi.

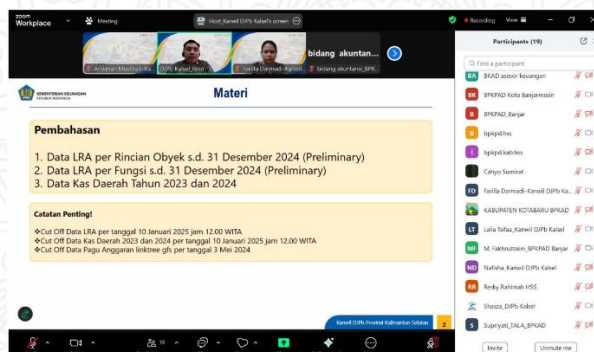
2. Belum terdapat pos dan akun Properti Investasi pada aplikasi SIPD RI sehingga Pemerintah Daerah harus melakukan perhitungan manual dalam memasukkan pos Properti Investasi pada neraca LKPD. Sesuai dengan hasil temuan BPK, baru terdapat 2 (dua) Pemda yang menyajikan aset Properti Investasi pada LKPD Tahun 2023, yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar.
3. Terdapat penyampaian informasi bahwa salah satu SKPD di Kabupaten Tanah Laut mencatatkan belanja yang seharusnya merupakan Belanja Barang dan Jasa menjadi sebagai Belanja Subsidi sebesar Rp340.000. Untuk penyusunan GFS Tahun 2024 *Preliminary*, data tersebut masih tercatat sebagai Belanja Subsidi. Perbaikan atas data akan dilakukan pada penyusunan *Unaudited*.

4. Resume Pelaksanaan Kegiatan

a. *One on One Meeting* Koordinasi Data Pemda Periode Desember 2024 dan *Sharing Session* Permasalahan Penyusunan Laporan Keuangan dengan BPKAD se-Kalimantan Selatan

Koordinasi ini dilaksanakan pada hari Jumat, 10 Januari 2025. Tujuan dari kegiatan ini adalah memastikan akurasi data LRA Pemda yang digunakan untuk penyusunan GFS Periode *Preliminary* Tahun 2024. Kegiatan ini sekaligus sebagai forum *sharing session* untuk mengetahui kendala dan permasalahan terkait aplikasi SIPD RI Kemendagri dan SIKD DJPK dari sisi Pemda. Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan konfirmasi atas data kas pemda yang ditujukan untuk penyusunan Analisis Tematik Semester II mengenai Kas Daerah.

Dari keseluruhan 14 Pemda, terdapat 11 Pemda yang hadir secara daring dalam kegiatan koordinasi data tersebut. Simpulan dari kegiatan tersebut di antaranya adalah Pemda lingkup Kalimantan Selatan melakukan konfirmasi data yang akan digunakan untuk penyusunan GFS sehingga dapat meningkatkan akurasi keandalan data. Selain itu, Pemda juga mengonfirmasi nilai Kas Daerah yang terdiri atas giro dan deposito per 31 Desember 2024. Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi forum rutin antara Pemda khususnya BPKAD dan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan untuk mewujudkan laporan keuangan konsolidasian yang akurat dan andal.



Poin-poin Pembahasan *One on One Meeting* Koordinasi Data Pemda

Kabupaten Tanah Laut	Periode	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Akhir per Fungsi	Saldo Akhir per Objek
Kabupaten Tanah Laut	31 Desember 2024	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Kabupaten Tanah Laut	31 Desember 2023	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

Sesi konfirmasi data LRA per Objek dengan LRA per Fungsi



b. Koordinasi Permohonan Data Perkembangan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKPD Lingkup Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Kegiatan dilaksanakan pada Jumat, 17 Januari 2025 bertempat di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh data perkembangan hasil tindak lanjut rekomendasi BPK RI dalam LHP atas LKPD lingkup wilayah Kalimantan Selatan. Koordinasi ini menjadi bentuk kolaborasi antara Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dan BPK RI Perwakilan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut dari opini WTP yang telah didapatkan seluruh pemda lingkup Kalimantan Selatan Tahun 2023.

Koordinasi tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang PAKP beserta tim PSAPD Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan dan Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan, Subauditorat Kalimantan Selatan I dan II BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Dari hasil koordinasi tersebut, diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyampaian bahan pembinaan dan bimbingan teknis oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan kepada Pemda.



Koordinasi perkembangan hasil tindak lanjut rekomendasi BPK



Tim PAKP Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan dan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan

c. Publikasi GFS periode Triwulan III Tahun 2024 pada Workshop Penyusunan LK UAPPA-W dan BLU Tahun 2024 Unaudited

Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 6 Februari 2025 melalui media *Microsoft Teams Meeting*. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah memberikan informasi terkait penyusunan laporan keuangan tingkat UAPPA-W dan BLU Tahun 2024 *Unaudited* serta mempublikasikan GFS Triwulan III Tahun 2024.

Peserta dalam kegiatan ini adalah 33 UAPPA-W dan 4 BLU lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, serta Tim Vera/VeraKI KPPN lingkup Kalimantan Selatan. Materi tentang GFS dan *update* informasi terkait statistik keuangan pemerintah tingkat wilayah Kalimantan Selatan disampaikan oleh Kepala Seksi Analisa, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan. Dengan adanya publikasi GFS kepada satker UAPPA-W dan BLU, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta terkait peran data keuangan Pemerintah Pusat di daerah pembentuk LK tingkat wilayah sehingga peningkatan kualitas data dapat diwujudkan.



Penyampaian materi pengenalan GFS



Penyampaian publikasi GFS Triwulan III Tahun 2024



d. Publikasi GFS Triwulan III Tahun 2024 di KPPN dan Pemda lingkup Kalimantan Selatan

Dalam rangka edukasi dan publikasi GFS, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan melakukan permintaan penayangan GFS Triwulan III Tahun 2024 pada KPPN dan Pemda. Publikasi GFS pada KPPN dilakukan dengan penayangan *dashboard* GFS Triwulan III Tahun 2024 melalui *virtual banner* di *front office* sehingga *stakeholders* KPPN yang berkunjung dapat mengakses informasi terkait GFS. Publikasi GFS pada videotron maupun situs resmi Pemda juga diharapkan dapat meluaskan informasi GFS kepada masyarakat. Bukti dukung publikasi GFS dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/PublikasiGFSTW3Kalsel>.



Penayangan GFS Triwulan III 2024 di Pemda Kabupaten Balangan



Penayangan GFS Triwulan III 2024 pada KPPN Pelaihari

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan data keuangan daerah konsolidasian pada Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan untuk Tahun 2024 *Preliminary*, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pendapatan Konsolidasian menunjukkan tren peningkatan sebesar 19,48% (yoy). Realisasi Pendapatan Pemerintah Pusat sebesar Rp22,51 triliun menurun tipis sebesar 0,84% (yoy) yang dikontribusikan oleh penurunan Pajak Dalam Negeri, terutama Pajak Penghasilan. Belanja dan Transfer Pemerintah Konsolidasian dapat diakselerasi mencapai Rp52,18 triliun atau meningkat 12,42% (yoy). Sedangkan realisasi Pendapatan Daerah tumbuh positif mencapai Rp44,54 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 27,75% (yoy). Kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah pada APBD masih menjadi yang terbesar pada APBD Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari sisi LSKP-TW Kalimantan Selatan, Pendapatan Statistik sebesar Rp36,68 triliun mengalami penurunan sebesar 48,42% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan perubahan *mapping* pendapatan akrual *dropping* dana transfer pada Pemerintah Pusat sehingga mengurangi nilai komponen Pendapatan Lainnya secara signifikan. Beban Statistik Rp37,91 triliun mengalami tren peningkatan sebesar 3,49% (yoy). *Net Worth* atau Kekayaan Bersih Provinsi Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp142,96 triliun, yang terdiri atas Aset Non Keuangan sebesar Rp123,37 triliun, Aset Keuangan sebesar Rp21,54 triliun, dan Kewajiban sebesar Rp1,95 triliun.

Berdasarkan analisis laporan keuangan Tahun 2024 *Preliminary*, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki rasio kemandirian daerah tertinggi yaitu sebesar 42,94%, dengan kategori “baik” (*range* 40% s.d. 50%). Kabupaten Balangan memiliki rasio kemandirian terendah, yaitu 3,83% dengan kategori “sangat kurang” (*range* 0% s.d. 10%). Rata-rata rasio kemandirian daerah pemerintah daerah lingkup provinsi Kalimantan Selatan sebesar 18,15% atau dalam kategori “kurang” (*range* 10% s.d. 20%). Hal ini menunjukkan daerah di Provinsi Kalimantan



Selatan masih mengandalkan transfer Pemerintah Pusat untuk melakukan membiayai pembangunan di daerah. Berdasarkan kondisi laporan keuangan dan statistik provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 *Preliminary*, berikut disampaikan rekomendasi *policy response* di wilayah Kalimantan Selatan.

- a. Pemerintah Daerah didorong untuk segera melakukan revisi kebijakan akuntansi aset tetap terkait dengan diberlakukannya PSAP 17 sehingga pemanfaatan dan penatausahaan aset Properti Investasi dapat optimal dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Pemerintah Daerah dapat menggali potensi Retribusi Pelayanan Kesehatan dan retribusi dari sektor penjualan produksi usaha daerah untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari pos retribusi daerah yang mengalami tren kenaikan signifikan pada *Preliminary* Tahun 2024 (yoy). Pemerintah Daerah dapat meningkatkan upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan memetakan sumber-sumber produksi khas daerah sehingga dapat dioptimalkan menjadi sumber PAD terutama dengan memanfaatkan posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan.
- c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu *melakukan* reviu belanja untuk meningkatkan kualitas belanja (*spending better*) terutama meningkatkan belanja modal untuk mempercepat *multiplier effect* bagi perekonomian regional.
- d. Diperlukan sistem informasi keuangan yang terintegrasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan akurasi data dan mempercepat akses data kapanpun diperlukan, untuk kepentingan analisis dan pengambilan keputusan manajerial.



Daftar Lampiran

Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah Periode *Preliminary* Tahun 2024

1. LRA, LO, dan Neraca LKPK-TW *Preliminary* Tahun 2024, yang dilengkapi dengan:
 - a. *Face* LRA, LO, dan Neraca LKPP-TW
 - b. *Face* LRA, LO, dan Neraca LKPDK-TW
2. LO dan Neraca LSKP-TW *Preliminary* Tahun 2024, yang dilengkapi dengan:
 - a. *Face* LO dan Neraca LSKPP-TW
 - b. *Face* LO dan Neraca LSKPDK-TW
3. Dokumen pendukung (terlampir pada tautan <https://s.id/lkpk-lskp-tw>)
 - a. LKPD atau data informasi keuangan yang diperoleh dari Pemerintah Daerah
 - b. Kertas Kerja *Excel input* data Pemerintah Daerah
 - c. Kertas Kerja *Excel* Eliminasi
4. Metadata
5. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah dan Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Uraian	Tahun 2024 (Preliminary)	Tahun 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	22.506.625.723.391	22.697.010.767.271	-0,84%
A.1	Pendapatan Perpajakan	20.128.585.199.779	19.998.673.192.390	0,65%
1	Penerimaan Dalam Negeri	19.541.325.094.779	19.572.814.258.390	-0,16%
2	Pajak Perdagangan Internasional	587.260.105.000	425.858.934.000	37,90%
A.2	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.378.040.523.612	2.698.337.574.881	-11,87%
1	Penerimaan Sumber Daya Alam	-	-	0,00%
2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	-	-	0,00%
3	Pendapatan PNBPN Lainnya	1.851.959.001.806	2.201.430.424.435	-15,87%
4	Pendapatan BLU	526.081.521.806	496.907.150.446	5,87%
A.3	Pendapatan Hibah	-	-	0,00%
1	Hibah	-	-	0,00%
B	BELANJA NEGARA	41.253.942.566.504	40.369.551.145.210	2,19%
B.1	Belanja Pemerintah Pusat per Wilayah	9.770.768.371.678	8.687.742.578.859	12,47%
1	Belanja Pegawai	4.084.553.659.637	3.603.130.591.687	13,36%
2	Belanja Barang	4.510.314.855.904	3.690.431.457.242	22,22%
3	Belanja Modal	1.158.313.686.137	1.379.605.229.930	-16,04%
4	Belanja Bantuan Sosial	17.586.170.000	14.575.300.000	20,66%
B.2	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	31.483.174.194.826	31.681.808.566.351	-0,63%
1	Transfer Ke Daerah	29.969.362.762.836	30.191.819.399.860	-0,74%
	Dana Transfer Umum	26.330.371.459.097	26.579.868.553.170	-0,94%
1.1	Transfer Dana Bagi Hasil	17.852.596.408.540	18.749.033.162.170	-4,78%
1.2	Transfer Dana Alokasi Umum	8.477.775.050.557	7.830.835.391.000	8,26%
	Dana Transfer Khusus	3.638.991.303.739	3.611.950.846.690	0,75%
1.4	Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik	1.030.756.758.978	1.064.871.753.673	-3,20%
1.5	Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2.299.353.466.261	2.291.092.064.017	0,36%
2	Dana Insentif Daerah	308.881.078.500	255.987.029.000	20,66%
3	Dana Desa	1.513.811.431.990	1.489.989.166.491	1,60%
C	Surplus (Defisit) Anggaran (A-B)	(18.747.316.843.113)	(17.672.540.377.939)	-6,08%
D	Pembiayaan	-	-	0,00%
E	SILPA (SIKPA)	(18.747.316.843.113)	(17.672.540.377.939)	-6,08%



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Uraian	Tahun 2024 (Preliminary)	Tahun 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
A	Pendapatan Pemerintah Daerah	44.536.541.647.403	34.861.597.897.950	27,75%
A.1	Pendapatan Asli Daerah	8.519.864.408.888	7.813.353.583.415	9,04%
1	Pajak Daerah	5.551.389.481.315	5.049.064.687.989	9,95%
2	Retribusi Daerah	1.123.230.025.411	147.348.264.467	662,30%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	231.331.887.879	202.599.376.248	14,18%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.613.913.014.283	2.414.341.254.711	-33,15%
A.2	Pendapatan Transfer	35.749.119.988.323	26.940.278.710.235	32,70%
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	33.708.636.629.134	25.194.238.764.744	33,80%
1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	1.817.559.373.833	1.387.573.642.289	30,99%
1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	20.489.076.707.048	12.716.373.956.643	61,12%
1.3	Dana Alokasi Umum	8.477.808.050.557	7.817.062.398.135	8,45%
1.4	Dana Alokasi Khusus	2.924.192.497.696	3.273.228.767.677	-10,66%
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	1.763.309.710.070	1.746.039.945.491	0,99%
2.1	Dana Penyesuaian	-	-	0,00%
2.2	Dana Insentif Daerah	542.634.809.380	256.050.779.000	111,92%
2.3	Dana Desa	1.220.674.900.690	1.489.989.166.491	-18,07%
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi	-	-	0,00%
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	0,00%
4	Transfer Bantuan Keuangan	277.173.649.119	-	100,00%
A.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	267.557.250.192	107.965.604.300	147,82%
1	Pendapatan Hibah	226.541.133.344	87.383.346.631	159,25%
2	Pendapatan Lainnya	41.016.116.848	20.582.257.669	99,28%
B	Belanja Pemerintah Daerah	37.466.787.779.167	29.861.483.298.739	25,47%
B.1	Belanja Operasi	25.059.541.930.162	21.413.917.813.066	17,02%
1	Belanja Pegawai	10.707.139.942.219	9.357.263.883.993	14,43%
2	Belanja Barang dan Jasa	12.059.224.089.180	10.340.646.950.339	16,62%
3	Belanja Bunga	11.523.137.245	21.667.483.262	-46,82%
4	Subsidi	2.016.944.231	1.398.782.820	44,19%
5	Hibah	2.013.796.726.124	1.487.106.968.616	35,42%
6	Bantuan Sosial	265.841.091.163	205.833.744.036	29,15%
B.2	Belanja Modal	12.391.357.437.315	8.403.015.243.198	47,46%
1	Belanja Modal Tanah	179.738.395.464	396.930.384.223	-54,72%



No	Uraian	Tahun 2024 (Preliminary)	Tahun 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.225.290.817.887	1.609.152.931.794	38,29%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.428.057.644.019	2.073.254.757.226	65,35%
4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	6.315.029.941.010	4.098.078.670.156	54,10%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	99.173.821.004	123.002.102.789	-19,37%
6	Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	198.065.894	179.390.033	10,41%
7	Belanja Modal Aset Lainnya	61.829.136.135	56.026.380.983	10,36%
8	Belanja Modal BLUD	82.039.615.902	46.390.625.994	76,85%
B.3	Belanja Tak Terduga	15.888.411.690	44.550.242.475	-64,34%
1	Belanja Tak Terduga	15.888.411.690	44.550.242.475	-64,34%
C	Transfer	3.770.928.710.213	3.001.017.464.522	25,66%
C.1	Transfer/Bagi Hasil ke Desa	76.704.868.027	59.338.079.307	29,27%
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	57.322.845.367	49.620.981.415	15,52%
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	19.382.022.660	9.717.097.892	99,46%
C.2	Transfer Bantuan Keuangan	3.694.223.842.186	2.941.679.385.215	25,58%
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	277.173.649.119	4.419.678.064	6171,35%
2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	3.417.050.193.067	2.937.259.707.151	16,33%
3	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	0,00%
D	Surplus (Defisit) Anggaran (A - B - C)	3.298.825.158.023	1.999.097.134.689	65,02%
E	Pembiayaan	6.074.358.431.492	4.993.218.224.561	21,65%
E.1	Penerimaan Pembiayaan	7.210.670.874.791	5.690.150.988.920	26,72%
1	Penggunaan SiLPA	6.952.552.101.655	5.552.168.695.333	25,22%
2	Pencairan Dana Cadangan	250.000.000.000	95.000.000.000	163,16%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	0,00%
4	Pinjaman Dalam Negeri		32.524.866.198	-100,00%
5	Penerimaan Kembali Piutang	8.118.773.136	10.423.618.765	-22,11%
6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		33.808.624	-100,00%
E.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.136.312.443.299	696.932.764.359	63,04%
1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	160.000.000.000	-87,50%
2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	936.578.346.671	351.426.760.989	166,51%
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	172.152.415.628	167.506.003.370	2,77%
4	Pemberian Pinjaman Daerah	7.581.681.000	18.000.000.000	-57,88%
5	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	0,00%
F.	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+E)	9.373.183.589.515	6.992.315.359.250	34,05%



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Uraian	Tahun 2024 (Preliminary)	Tahun 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
A	Pendapatan Negara dan Hibah	36.731.886.250.800	30.743.498.902.646	19,48%
A.1	Pendapatan Perpajakan	25.679.974.681.094	25.047.737.880.379	2,52%
1	Pajak Dalam Negeri	25.092.714.576.094	24.621.878.946.379	1,91%
2	Pajak Perdagangan Internasional	587.260.105.000	425.858.934.000	37,90%
A.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	10.825.370.436.362	5.608.377.675.636	93,02%
1	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan negara Yang Dipisahkan	231.331.887.879	202.599.376.248	14,18%
2	PNBP Lainnya	3.776.385.572.264	2.952.224.830.977	27,92%
3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	0,00%
4	Pendapatan Transfer	5.202.334.476.928	145.751.388.769	3469,32%
5	Bantuan Keuangan	277.173.649.119	-	100,00%
6	Pendapatan BLU	1.338.144.850.172	2.307.802.079.642	-42,02%
A.3	Hibah	226.541.133.344	87.383.346.631	159,25%
1	Pendapatan Hibah	226.541.133.344	87.383.346.631	159,25%
B	Belanja dan Transfer Pemerintah	52.180.377.935.890	46.416.942.145.896	12,42%
B.1	Belanja Pempus/Pemda	47.237.556.150.845	38.549.225.877.598	22,54%
1	Belanja Pegawai	14.791.693.601.856	12.960.394.475.680	14,13%
2	Belanja Barang dan Jasa	16.569.538.945.084	14.031.078.407.581	18,09%
3	Belanja Modal	13.549.671.123.452	9.782.620.473.128	38,51%
4	Pembayaran Bunga Utang	11.523.137.245	21.667.483.262	-46,82%
5	Subsidi	2.016.944.231	1.398.782.820	44,19%
6	Hibah	2.013.796.726.124	1.487.106.968.616	35,42%
7	Belanja Bantuan Sosial	283.427.261.163	220.409.044.036	28,59%
8	Belanja Lain-Lain (Belanja tak Terduga)	15.888.411.690	44.550.242.475	-64,34%
B.2	Transfer- Transfer Antar Pemda	4.942.821.785.045	7.867.716.268.298	-37,18%
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	76.704.868.027	59.338.079.307	29,27%
2	Transfer Bantuan Keuangan	3.694.223.842.186	2.941.679.385.215	25,58%
3	Transfer Pempus ke Pemda dan Dana Desa	1.171.893.074.832	4.866.698.803.776	-75,92%
C	Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(15.448.491.685.090)	(15.673.443.243.250)	1,44%
D	Pembiayaan	6.074.358.431.492	4.993.218.224.561	21,65%
D.1	Penerimaan Pembiayaan	7.210.670.874.791	5.690.150.988.920	26,72%
1	Penggunaan SILPA TA Sebelumnya	6.952.552.101.655	5.552.168.695.333	25,22%



No	Uraian	Tahun 2024 (Preliminary)	Tahun 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
2	Pencairan Dana Cadangan	250.000.000.000	95.000.000.000	163,16%
3	Hasil Penjualan Keayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	0,00%
4	Pinjaman Dalam Negeri		32.524.866.198	-100,00%
5	Penerimaan Kembali Piutang	8.118.773.136	10.423.618.765	-22,11%
6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		33.808.624	-100,00%
D.2	Pengeluaran Pembiayaan	1.136.312.443.299	696.932.764.359	63,04%
1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000	160.000.000.000	-87,50%
2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	936.578.346.671	351.426.760.989	166,51%
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	172.152.415.628	167.506.003.370	2,77%
4	Pemberian Pinjaman Daerah	7.581.681.000	18.000.000.000	-57,88%
5	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	0,00%
E	E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran - (D + C)	(9.374.133.253.598)	(10.680.225.018.689)	12,23%



**LAPORAN OPERASIONAL
PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Uraian	Tahun 2024 (Preliminary)	Tahun 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
A	KEGIATAN OPERASIONAL			
A.1	PENDAPATAN OPERASIONAL	25.238.927.330.378	49.389.354.239.855	-48,90%
1	PENDAPATAN PERPAJAKAN	23.391.154.027.551	20.795.261.821.845	12,48%
1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	10.378.888.365.663	11.657.900.058.239	-10,97%
1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	9.128.948.414.953	5.952.631.260.132	53,36%
1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	3.194.410.696.505	2.662.445.298.487	19,98%
1.4	Pendapatan Cukai	5.445.959.000	3.286.235.000	65,72%
1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	95.263.216.430	92.400.838.987	3,10%
1.6	Pendapatan Bea Masuk	48.927.456.000	138.233.082.000	-64,61%
1.7	Pendapatan Bea Keluar	539.269.919.000	288.365.049.000	87,01%
1.8	Pendapatan Pajak Lain-lain	-	-	0,00%
2	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	1.838.561.615.617	1.777.929.093.659	3,41%
2.1	Pendapatan BLU	523.864.126.555	491.641.112.674	6,55%
2.2	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.314.697.489.062	1.286.287.980.985	2,21%
3	PENDAPATAN HIBAH	9.211.687.210	-	100,00%
4	PENDAPATAN PENYESUAIAN	-	26.816.163.324.351	-100,00%
4.1	Pendapatan <i>Dropping</i> Dana Transfer	-	26.816.163.324.351	-100,00%
A.2	BEBAN OPERASIONAL	42.011.667.814.955	35.693.857.985.069	17,70%
1	Beban Pegawai	4.092.343.834.223	3.631.764.944.849	12,68%
2	Beban Persediaan	435.717.720.614	286.070.097.792	52,31%
3	Beban Barang dan Jasa	2.697.707.107.690	2.015.251.184.491	33,86%
4	Beban Pemeliharaan	398.181.159.782	374.076.483.290	6,44%
5	Beban Perjalanan Dinas	625.708.946.436	504.606.682.221	24,00%
6	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	494.803.767.576	570.101.309.476	-13,21%
7	Beban Bantuan Sosial	17.382.057.642	13.909.908.750	24,96%
8	Beban Lain-lain	-	-	0,00%
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.677.855.247.127	1.410.881.590.653	18,92%
10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	88.793.779.039	71.032.459.196	25,00%
11	Beban Transfer	31.483.174.194.826	26.816.163.324.351	17,40%
A.3	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(16.772.740.484.577)	13.695.496.254.786	-222,47%



No	Uraian	Tahun 2024 (Preliminary)	Tahun 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
B	KEGIATAN NON OPERASIONAL	451.720.033.413	94.714.841.885	376,93%
B.1	SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	(24.368.385.660)	(21.080.910.280)	-15,59%
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	5.255.453.344	3.785.823.051	38,82%
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	29.623.839.004	24.866.733.331	19,13%
B.2	SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	0,00%
1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	0,00%
2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	0,00%
B.3	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	476.088.419.073	115.795.752.165	311,14%
1	Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya	486.655.031.291	118.477.584.139	310,76%
2	Beban dari Kegiatan non Operasional Lainnya	10.566.612.218	2.681.831.974	294,01%
C	SURPLUS/(DEFISIT) LO	(16.321.020.451.164)	13.790.211.096.671	-218,35%



**LAPORAN OPERASIONAL
PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Uraian	Tahun 2024 (Preliminary)	Tahun 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
A	KEGIATAN OPERASIONAL			
A.1	PENDAPATAN	43.315.866.746.713	34.055.740.828.727	27,19%
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.519.864.408.888	7.954.552.003.013	7,11%
1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	5.551.389.481.315	5.075.576.560.267	9,37%
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	1.123.230.025.411	151.006.638.036	643,83%
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	231.331.887.879	266.514.843.575	-13,20%
1.4	Lain-lain PAD yang sah-LO	1.613.913.014.283	2.461.453.961.135	-34,43%
2	PENDAPATAN TRANSFER	34.528.445.087.633	25.585.158.164.826	34,95%
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	33.708.636.629.134	25.329.107.385.826	33,08%
2.1.1	Bagi Hasil Pajak	1.817.559.373.833	1.210.774.221.075	50,12%
2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	20.489.076.707.048	13.191.435.591.561	55,32%
2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.477.808.050.557	7.720.141.273.325	9,81%
2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.924.192.497.696	3.206.756.299.865	-8,81%
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO	542.634.809.380	256.050.779.000	111,92%
2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya -LO	-	-	0,00%
2.4	Bantuan Keuangan	277.173.649.119	-	100,00%
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	267.557.250.192	516.030.660.888	-48,15%
3.1	Pendapatan Hibah	226.541.133.344	491.368.527.827	-53,90%
3.2	Pendapatan Lainnya	41.016.116.848	24.662.133.061	66,31%
A.2	BEBAN	34.046.611.076.877	27.656.931.492.062	23,10%
1	BEBAN OPERASI	30.275.682.366.664	26.134.056.274.288	15,85%
1.1	Beban Pegawai	10.707.139.942.219	9.368.152.913.802	14,29%
1.2	Beban Barang dan Jasa	12.930.403.680.099	10.108.769.866.420	27,91%
1.3	Beban Bunga	11.523.137.245	21.667.483.262	-46,82%
1.4	Beban Subsidi	2.016.944.231	1.451.082.820	39,00%
1.5	Beban Hibah	2.013.796.726.124	1.821.022.850.336	10,59%
1.6	Beban Bantuan Sosial	265.841.091.163	213.539.734.002	24,49%
1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.344.960.845.583	4.306.762.951.911	0,89%
1.8	Beban Penyisihan Piutang	-	34.583.653.196	-100,00%
1.9	Beban Lain-lain	-	258.105.738.539	-100,00%



No	Uraian	Tahun 2024 (Preliminary)	Tahun 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
2	BEBAN TRANSFER	3.770.928.710.213	1.522.875.217.774	147,62%
2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	57.322.845.367	60.436.251.592	-5,15%
2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	19.382.022.660	135.437.122.354	-85,69%
2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah ke Pemda Lainnya	277.173.649.119	-	100,00%
2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	3.417.050.193.067	1.327.001.843.828	157,50%
2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	0,00%
A.3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	9.269.255.669.836	6.398.809.336.665	44,86%
B	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	(81.196.539.789)	100,00%
B.1	SURPLUS NON OPERASIONAL	-	86.919.784.217	-100,00%
1	Surplus penjualan aset non lancar		744.370.356	-100,00%
2	Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang	-	-	0,00%
3	Surplus dari kegiatan non operasional lainnya		86.175.413.861	-100,00%
B.2	DEFISIT NON OPERASIONAL	-	168.116.324.006	-100,00%
1	Defisit penjualan aset non lancar		66.471.708.303	-100,00%
2	Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang	-	-	0,00%
3	Defisit dari kegiatan non operasional lainnya		101.644.615.703	-100,00%
C	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	9.269.255.669.836	6.317.612.796.876	46,72%
C.1	PENDAPATAN LUAR BIASA	-	-	0,00%
C.2	BEBAN LUAR BIASA		9.144.829.675	-100,00%
D	SURPLUS/DEFISIT-LO	9.269.255.669.836	6.308.467.967.201	46,93%



LAPORAN OPERASIONAL
KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Uraian	Tahun 2024 (Preliminary)	Tahun 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
A	KEGIATAN OPERASIONAL			
A.1	PENDAPATAN OPERASIONAL	39.454.547.565.382	58.302.770.426.479	-32,33%
1	PENDAPATAN PERPAJAKAN	28.942.543.508.866	25.870.838.382.112	11,87%
1.1	Pendapatan Pajak dalam Negeri	28.354.346.133.866	25.444.240.251.112	11,44%
1.1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	10.378.888.365.663	11.657.900.058.239	-10,97%
1.1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	9.128.948.414.953	5.952.631.260.132	53,36%
1.1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	3.194.410.696.505	2.662.445.298.487	19,98%
1.1.4	Pendapatan Cukai	5.445.959.000	3.286.235.000	65,72%
1.1.5	Pendapatan Perpajakan Pemda	5.551.389.481.315	5.075.576.560.267	9,37%
1.1.6	Pendapatan Pajak Lainnya	95.263.216.430	92.400.838.987	3,10%
1.2	Pendapatan pajak perdagangan internasional-LO	588.197.375.000	426.598.131.000	37,88%
1.2.1	Pendapatan Bea Masuk	48.927.456.000	138.233.082.000	-64,61%
1.2.2	Pendapatan Bea Keluar	539.269.919.000	288.365.049.000	87,01%
1.2.3	Reklasifikasi dari Pajak yang Belum Disetor Bendahara	-	-	0,00%
2	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	3.455.891.907.585	2.263.875.173.478	52,65%
2.1	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	231.331.887.879	266.514.843.575	-13,20%
2.2	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya – LO	3.224.560.019.706	1.997.360.329.903	61,44%
2.2.1	Pendapatan dari Pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan	80.362.812.946	50.156.137.743	60,23%
2.2.2	Pendapatan Jasa	1.283.984.581.860	317.614.510.280	304,26%
2.2.3	Pendapatan Bunga	427.018.402.279	178.337.824.767	139,44%
2.2.4	Pendapatan Pendidikan	-	5.039.005.000	-100,00%
2.2.5	Pendapatan Iuran dan Denda	119.434.605.357	176.304.349.531	-32,26%
2.2.6	Pendapatan Lain-lain	1.313.759.617.264	1.269.908.502.582	3,45%
3	PENDAPATAN TRANSFER	5.483.494.001.658	518.885.642.466	956,78%
3.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LO	4.968.547.746.048	518.821.892.466	857,66%
3.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	121.531.601.555	-100,00%
3.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	4.968.547.746.048	397.290.290.911	1150,61%
3.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	233.753.730.880	63.750.000	366572,52%
3.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	-	-	0,00%



No	Uraian	Tahun 2024 (Preliminary)	Tahun 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
3.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LO	-	-	0,00%
3.4	Bantuan Keuangan	281.192.524.730	-	100,00%
4	PENDAPATAN BLU-LO	1.335.927.454.921	2.325.259.897.842	-42,55%
5	PENDAPATAN HIBAH	235.752.820.554	491.368.527.827	-52,02%
6	PENDAPATAN LAINNYA	937.871.798	26.832.542.802.754	-100,00%
A.2	BEBAN OPERASIONAL DAN BEBAN TRANSFER	46.958.032.380.123	38.208.464.835.028	22,90%
1	Beban Pegawai	14.799.483.776.442	12.999.917.858.651	13,84%
2	Beban Persediaan	435.722.180.496	286.073.431.020	52,31%
3	Beban Barang dan Jasa	17.146.800.201.701	13.572.802.192.670	26,33%
4	Beban Bunga	11.523.137.245	21.667.483.262	-46,82%
5	Beban Subsidi	2.016.944.231	1.451.082.820	39,00%
6	Beban Hibah	2.013.796.726.124	1.821.022.850.336	10,59%
7	Beban Bantuan Sosial	283.223.148.805	227.449.642.752	24,52%
8	Beban Lain-lain/Beban Tidak Terduga		258.105.738.539	-100,00%
9	Beban Akrua Lainnya	6.111.609.871.749	5.823.260.654.956	4,95%
10	Beban Transfer	6.153.856.393.330	3.196.713.900.022	92,51%
A.3	Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional (A.1 -A.2)	(7.503.484.814.741)	20.094.305.591.451	-137,34%
B	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL			
B.1	Surplus (Defisit) Pempus Selisih Kurs Belum Terealisasi	1.126	636	77,04%
B.2	Surplus (Defisit) Pempus Pelepasan Aset Non Lancar	(24.368.385.660)	(21.080.910.280)	-15,59%
B.3	Surplus (Defisit) Pempus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	0,00%
B.4	Surplus (Defisit) Pempus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	476.419.157.947	115.795.751.529	311,43%
B.5	Surplus (Defisit) Pemda Penjualan Aset Non Lancar	-	(65.727.337.947)	100,00%
B.6	Surplus (Defisit) Pemda Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	(15.469.201.842)	100,00%
B.7	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	-		0,00%
B.8	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	452.050.773.413	13.518.302.096	3243,99%
C	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7.051.434.041.328)	20.107.823.893.547	-135,07%
C.1	Pendapatan luar biasa	-	-	0,00%
C.2	Beban luar biasa		9.144.829.675	-100,00%
C.3	Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa	-	(9.144.829.675)	100,00%
D	SURPLUS/(DEFISIT) LO	(7.051.434.041.328)	20.098.679.063.872	-135,08%



NERACA PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Uraian	31 Desember 2024 (Preliminary)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
A	ASET	51.626.650.430.794	48.772.476.315.305	5,85%
A.1	Aset lancar	4.602.555.365.549	3.512.719.835.270	31,03%
1	Kas dan Setara Kas	1.034.385.244.610	684.330.073.232	51,15%
1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	102.384.035	193.789.035	-47,17%
1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	149.292.000	-100,00%
1.3	Kas Lainnya dan Setara Kas	579.882.221.053	360.080.436.922	61,04%
1.4	Kas pada BLU	454.400.639.522	323.906.555.275	40,29%
2	Investasi Jangka Pendek/BLU (Investasi dalam Deposito)	59.000.000.000	56.000.000.000	5,36%
3	Belanja dibayar di muka	7.649.219.140	8.065.649.953	-5,16%
4	Uang Muka Belanja	1.945.880	7.353.560	-73,54%
5	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	3.336.004.980	8.936.375.383	-62,67%
6	Piutang	1.988.432.113.179	1.319.192.447.674	50,73%
6.1	Piutang Pajak	2.171.324.835.379	1.621.942.863.610	33,87%
6.2	Piutang Bukan Pajak	744.433.603.413	658.919.665.546	12,98%
6.3	Bagian Lancar TP/TGR	6.000.000	-	100,00%
6.4	Piutang dari KUN (Uang Muka yang Akan Diterima)	-	-	0,00%
6.5	Piutang dari Kegiatan BLU	5.021.675.000	5.556.607.076	-9,63%
6.6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(932.354.000.613)	(967.226.688.558)	3,61%
7	Persediaan	1.509.750.837.760	1.436.187.935.468	5,12%
8	Persediaan yang Belum Diregister	-	-	0,00%
A.2	Investasi Jangka Panjang	-	-	0,00%
A.3	Aset Tetap	46.588.343.597.973	44.895.398.557.306	3,77%
1	Tanah	30.315.877.430.074	29.557.887.080.147	2,56%
2	Peralatan dan Mesin	8.182.680.784.633	7.500.898.778.693	9,09%
3	Gedung dan Bangunan	6.728.583.608.038	6.197.187.870.068	8,57%
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	18.079.964.768.484	15.636.126.323.119	15,63%
5	Aset Tetap Lainnya	342.270.853.007	274.061.194.187	24,89%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	362.319.053.491	1.181.033.675.096	-69,32%
7	Aset Tetap Lainnya Belum Diregister	-	-	0,00%
8	Aset Konsesi Jasa	308.747.078.243	303.990.824.420	1,56%
9	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(17.732.099.977.997)	(15.755.787.188.424)	-12,54%
A.4	Properti Investasi	1.679.820.557	550.176.362	205,32%
1	Properti Investasi	1.802.994.370	656.927.000	174,46%
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(123.173.813)	(106.750.638)	-15,38%



No	Uraian	31 Desember 2024 (Preliminary)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
A.5	Piutang Jangka Panjang	1.186.839.981	2.339.725.369	-49,27%
1	Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	3.532.451.650	3.523.161.050	0,26%
2	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	(2.345.611.669)	(1.183.435.681)	-98,20%
A.6	Aset Lainnya	432.884.806.734	361.468.020.998	19,76%
1	Aset Tak Berwujud	255.856.280.756	87.857.923.887	191,22%
2	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	82.312.696.589	220.858.355.438	-62,73%
3	Aset Lain-lain	339.487.083.282	271.592.926.705	25,00%
4	Aset Lainnya yang Belum Diregister	-	-	0,00%
5	Akumulasi Penyusutan	-	-	0,00%
5.1	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(172.786.539.451)	(160.566.080.563)	-7,61%
5.2	Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(71.984.714.442)	(58.275.104.469)	-23,53%
B	KEWAJIBAN	480.553.528.096	1.256.003.737.171	-61,74%
B.1	Kewajiban Jangka Pendek	195.632.118.136	968.341.792.173	-79,80%
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	121.517.313.552	189.791.290.503	-35,97%
2	Utang Transfer	2.682.921.155	3.066.732.253	-12,52%
3	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	20.362.273.143	722.785.560.116	-97,18%
4	Uang Jangka Pendek Lainnya	18.738	88.065.007	-99,98%
5	Pendapatan Diterima Dimuka	50.967.207.513	52.518.739.294	-2,95%
6	Hibah yang belum disahkan	-	-	0,00%
7	Uang Muka dari KPPN	102.384.035	91.405.000	12,01%
B.2	Kewajiban Jangka Panjang	284.921.409.960	287.661.944.998	-0,95%
1	Kewajiban Konsesi Jasa	284.921.409.960	287.661.944.998	-0,95%
C	EKUITAS	51.146.096.902.698	47.516.472.578.134	7,64%
D	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	51.626.650.430.794	48.772.476.315.305	5,85%



**NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Uraian	31 Desember 2024 (Preliminary)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
A	ASET	91.779.005.652.567	80.757.854.073.521	13,65%
A.1	ASET LANCAR	10.886.920.490.689	8.506.061.264.737	27,99%
1	Kas dan Setara Kas	9.373.183.589.515	6.992.324.363.563	34,05%
1.1	Kas di Kas Daerah	8.399.116.170.821	6.421.771.085.486	30,79%
1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	138.372.980	145.786.858	-5,09%
1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.468.396.500	1.279.910.238	92,86%
1.4	Kas di BLUD	897.587.691.125	524.410.055.424	71,16%
1.5	Kas Lainnya	73.872.958.090	44.717.525.557	65,20%
1.6	Setara Kas	-	-	0,00%
2	Piutang Pendapatan	1.410.230.944.555	1.410.230.944.555	0,00%
3	Piutang Lainnya	23.424.363.327	23.424.363.327	0,00%
4	Penyisihan Piutang	(567.056.347.425)	(567.056.347.425)	0,00%
5	Beban Dibayar Dimuka	1.003.292.067	1.003.292.067	0,00%
6	Investasi Jangka Pendek	-	-	0,00%
7	Persediaan	646.134.648.650	646.134.648.650	0,00%
A.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	6.333.326.430.363	5.396.748.083.692	17,35%
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	619.453.134	619.453.134	0,00%
1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	0,00%
1.2	Dana Bergulir	26.024.000	26.024.000	0,00%
1.3	Investasi Non Permanen Lainnya	593.429.134	593.429.134	0,00%
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	6.332.706.977.229	5.396.128.630.558	17,36%
2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.332.706.977.229	5.396.128.630.558	17,36%
2.2	Investasi Permanen Lainnya	-	-	0,00%
A.3	ASET TETAP	66.200.148.315.466	58.321.357.968.836	13,51%
1	Tanah	19.257.002.440.699	19.077.264.045.235	0,94%
2	Peralatan dan Mesin	15.030.534.434.282	12.805.243.616.395	17,38%
3	Gedung dan Bangunan	25.567.119.596.056	22.139.061.952.037	15,48%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.272.338.220.141	39.981.045.772.195	15,74%
5	Aset Tetap Lainnya	1.070.103.120.194	970.929.299.190	10,21%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.453.271.478.597	1.453.073.412.703	0,01%
7	Akumulasi Penyusutan			
	Akumulasi Penyusutan-Peralatan dan Mesin	(10.456.131.047.027)	(9.303.274.513.853)	-12,39%
	Akumulasi Penyusutan-Gedung dan Bangunan	(7.050.123.946.690)	(6.409.203.587.900)	-10,00%



No	Uraian	31 Desember 2024 (Preliminary)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
	Akumulasi Penyusutan-Jalan, Irigasi dan Jaringan	(24.906.972.381.489)	(22.363.466.903.232)	-11,37%
	Akumulasi Penyusutan-Aset Tetap Lainnya	(36.993.599.297)	(29.315.123.934)	-26,19%
A.4	Dana Cadangan	-	236.905.476.344	-100,00%
A.5	ASET LAINNYA	8.358.610.416.049	8.296.781.279.912	0,75%
1	Tagihan Jangka Panjang	12.998.671.425	12.954.935.021	0,34%
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	274.278.799.203	274.120.473.912	0,06%
3	Aset Tidak Berwujud	314.871.481.421	311.586.514.577	1,05%
4	Aset Lain-lain	7.917.492.279.232	7.857.429.357.292	0,76%
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(161.030.815.232)	(159.310.000.890)	-1,08%
B	KEWAJIBAN	1.470.657.973.034	1.642.810.388.662	-10,48%
B.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.422.448.968.505	1.569.254.920.389	-9,36%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.981.422.317	5.981.422.317	0,00%
2	Utang Bunga	-	-	0,00%
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31.885.092.573	178.691.044.457	-82,16%
4	Pendapatan Diterima Dimuka	17.579.094.413	17.579.094.413	0,00%
5	Utang Belanja	751.046.643.720	751.046.643.720	0,00%
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	615.956.715.482	615.956.715.482	0,00%
B.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	48.209.004.529	73.555.468.273	-34,46%
1	Utang Dalam Negeri	48.209.004.529	73.555.468.273	-34,46%
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	0,00%
C	EKUITAS	90.308.347.679.533	79.115.043.684.859	14,15%
D	JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	91.779.005.652.567	80.757.854.073.521	13,65%



**NERACA KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Uraian	31 Desember 2024 (Preliminary)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
A	ASET	143.405.656.083.361	129.530.330.388.826	10,71%
A.1	Aset Lancar	15.489.475.856.241	12.018.781.100.007	28,88%
1	Kas dan Bank	10.407.568.834.128	7.676.654.436.795	35,57%
1.1	Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah / Kas di RKUD	8.399.116.170.822	6.421.771.085.486	30,79%
1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.570.780.535	1.473.699.273	74,44%
1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	138.372.980	295.078.858	-53,11%
1.4	Kas Lainnya dan Setara Kas	653.755.179.143	404.797.962.479	61,50%
1.5	Kas pada BLU	1.351.988.330.648	848.316.610.699	59,37%
2	Investasi Jangka Pendek/BLU (Investasi dalam Deposito)	59.000.000.000	56.000.000.000	5,36%
3	Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja	13.162.777.515	19.184.986.411	-31,39%
6	Piutang	2.853.858.758.188	2.184.619.092.683	30,63%
6.1	Piutang Pajak	2.171.324.835.379	1.621.942.863.610	33,87%
6.2	Piutang Bukan Pajak	2.154.664.547.968	2.069.150.610.101	4,13%
6.3	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran	3.948.998.276	3.948.998.276	0,00%
6.4	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	6.000.000	-	100,00%
6.5	Piutang lain-lain	23.324.724.603	23.859.656.679	-2,24%
6.6	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1.499.410.348.038)	(1.534.283.035.983)	2,27%
7.	Persediaan	2.155.885.486.410	2.082.322.584.118	3,53%
A.2	Investasi Jangka Panjang	6.333.326.430.363	5.396.748.083.692	17,35%
1	Investasi Non Permanen	619.453.134	619.453.134	0,00%
1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	-	-	0,00%
1.2	Dana Bergulir	6.331.631.356	6.331.631.356	0,00%
1.3	Investasi Non Permanen Lainnya (Pinjaman kepada BUMN/D)	(5.712.178.222)	(5.712.178.222)	0,00%
2	Investasi Permanen	6.332.706.977.229	5.396.128.630.558	17,36%
2.1	Investasi Permanen PMN/D	6.332.706.977.229	5.396.128.630.558	17,36%
2.2	Investasi Permanen Lainnya	-	-	0,00%
A.3	Aset Tetap	112.788.491.913.439	103.216.756.526.142	9,27%
1	Tanah	49.572.879.870.773	48.635.151.125.382	1,93%
2	Peralatan dan Mesin	23.213.215.218.915	20.306.142.395.088	14,32%



No	Uraian	31 Desember 2024 (Preliminary)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
3	Gedung dan Bangunan	32.295.703.204.094	28.336.249.822.105	13,97%
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	64.352.302.988.625	55.617.172.095.314	15,71%
5	Aset tetap lainnya	1.412.373.973.201	1.244.990.493.377	13,44%
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	1.815.590.532.088	2.634.107.087.799	-31,07%
7	Konsesi Jasa	308.747.078.243	303.990.824.420	1,56%
8	Aset Tetap yang Belum Diregister	-	-	0,00%
9	Akumulasi Penyusutan	(60.182.320.952.500)	(53.861.047.317.343)	-11,74%
	a. Akumulasi Penyusutan-Peralatan dan Mesin	(16.985.482.284.898)	(15.306.576.614.479)	-10,97%
	b. Akumulasi Penyusutan-Gedung dan Bangunan	(8.328.973.039.423)	(7.491.218.883.916)	-11,18%
	c. Akumulasi Penyusutan-Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(34.760.979.795.222)	(30.975.883.227.826)	-12,22%
	d. Akumulasi Penyusutan-Aset Tetap Lainnya	(70.404.193.858)	(62.959.875.183)	-11,82%
	e. Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	(36.481.639.099)	(24.408.715.939)	-49,46%
A.4	Properti Investasi	1.679.820.557	550.176.362	205,32%
1	Properti Investasi	1.802.994.370	656.927.000	174,46%
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(123.173.813)	(106.750.638)	-15,38%
A.4	Piutang Jangka Panjang	14.185.511.406	15.294.660.390	-7,25%
1	Tagihan piutang penjualan angsuran	1.642.422.413	1.641.947.792	0,03%
2	Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi	14.888.700.662	14.836.148.279	0,35%
3	Penyisihan piutang jangka panjang	(2.345.611.669)	(1.183.435.681)	-98,20%
A.5	Dana Cadangan	-	236.905.476.344	-100,00%
A.6	Aset Lainnya	8.778.496.551.355	8.645.294.365.889	1,54%
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	274.278.799.203	274.120.473.912	0,06%
2	Aset Tak Berwujud	570.727.762.176	399.444.438.464	42,88%
3	Aset yang Dibatasi Penggunaannya	82.312.696.589	220.858.355.438	-62,73%
4	Aset Lain-lain	8.256.979.362.514	8.129.022.283.997	1,57%
5	Akumulasi Amortisasi	(405.802.069.127)	(378.151.185.922)	-7,31%
B	KEWAJIBAN	1.951.211.501.130	2.898.814.125.833	-32,69%
B.1	Kewajiban Jangka Pendek	1.618.081.086.641	2.537.596.712.562	-36,24%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	5.981.422.317	5.981.422.317	0,00%
2	Utang Kepada Pihak Ketiga	872.563.957.272	940.837.934.223	-7,26%
3	Utang Bunga	-	-	0,00%
4	Utang Belanja	-	-	0,00%
5	Utang Transfer	2.682.921.155	3.066.732.253	-12,52%



No	Uraian	31 Desember 2024 (Preliminary)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
6	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31.885.092.573	178.691.044.457	-82,16%
7	Utang Yang Belum Ditagihkan			0,00%
8	Utang Jangka Pendek Lainnya	633.535.828.633	1.408.928.174.312	-55,03%
9	Uang Muka	102.384.035	91.405.000	12,01%
10	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	20.362.273.143	-	100,00%
11	Pendapatan Diterima Dimuka	50.967.207.513	-	100,00%
B.2	Kewajiban Jangka Panjang	333.130.414.489	361.217.413.271	-7,78%
1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	48.209.004.529	73.555.468.273	-34,46%
2	Kewajiban Konsesi Jasa	284.921.409.960	287.661.944.998	-0,95%
C	EKUITAS	141.454.444.582.231	126.631.516.262.993	11,71%
D	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	143.405.656.083.361	129.530.330.388.826	10,71%



**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode	Akun Statistik Keuangan Pemerintah	Tahun 2024 (Preliminary)	Tahun 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH:				
1	Pendapatan	22.501.370.270.047	63.062.776.089.430	-64,32%
1.1	Pajak	20.122.609.088.779	19.990.052.244.961	0,66%
1.2	Kontribusi Sosial	-	-	0,00%
1.3	Hibah	16.042.344.020	3.385.491.830	373,86%
1.4	Pendapatan Lainnya	2.362.718.837.248	43.069.338.352.639	-94,51%
2	Beban	39.424.269.988.400	38.989.945.915.280	1,11%
2.1	Kompensasi Pegawai	4.084.553.659.637	3.614.975.223.539	12,99%
2.2	Penggunaan Barang dan Jasa	3.782.265.280.937	3.110.333.153.082	21,60%
2.3	Konsumsi Aset Tetap	-	-	0,00%
2.4	Bunga	-	-	0,00%
2.5	Subsidi	-	-	0,00%
2.6	Hibah	31.483.174.194.826	31.681.808.566.351	-0,63%
2.7	Manfaat Sosial	17.586.170.000	14.575.300.000	20,66%
2.8	Beban Lainnya	56.690.683.000	568.253.672.308	-90,02%
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	(16.922.899.718.353)	24.072.830.174.150	-170,30%
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	(16.922.899.718.353)	24.072.830.174.150	-170,30%
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN:				
3.1	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	1.824.417.124.760	1.375.819.406.879	32,61%
3.1.1	Aset Tetap	1.143.744.077.370	1.369.245.655.785	-16,47%
3.1.2	Perubahan Persediaan	671.358.891.967	-	100,00%
3.1.3	Barang Berharga	-	-	0,00%
3.1.4	Aset Non Produksi	9.314.155.423	6.573.751.094	41,69%
NLB	Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	(18.747.316.843.113)	22.697.010.767.271	-182,60%
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN):				
3.2	Akuisisi Neto Aset Keuangan	(18.747.316.843.113)	22.697.010.767.271	-182,60%
3.2.1	Dalam Negeri	(18.747.316.843.113)	22.697.010.767.271	-182,60%
3.2.2	Luar Negeri	-	-	0,00%
3.3	Keterjadian Kewajiban Neto	-	-	0,00%
3.3.1	Dalam Negeri	-	-	0,00%
3.3.2	Luar Negeri	-	-	0,00%



**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode	Akun Statistik Keuangan Pemerintah	Tahun 2024 (Preliminary)	Tahun 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH:				
1	Pendapatan	46.895.704.727.504	37.099.555.263.553	26,41%
1.1	Pajak	5.551.389.481.315	5.049.064.687.989	9,95%
1.2	Kontribusi Sosial	-	-	0,00%
1.3	Hibah	38.169.336.754.542	29.190.426.680.750	30,76%
1.4	Pendapatan Lainnya	3.174.978.491.647	2.860.063.894.814	11,01%
2	Beban	31.207.662.762.046	26.700.517.927.085	16,88%
2.1	Kompensasi Pegawai	10.356.747.467.517	9.357.263.883.993	10,68%
2.2	Penggunaan Barang dan Jasa	12.162.541.944.556	10.173.278.719.076	19,55%
2.3	Konsumsi Aset Tetap	-	-	0,00%
2.4	Bunga	11.523.137.245	21.667.483.262	-46,82%
2.5	Subsidi	2.016.944.231	1.398.782.820	44,19%
2.6	Hibah	6.648.493.251.181	5.630.299.646.568	18,08%
2.7	Manfaat Sosial	265.841.091.163	205.833.744.036	29,15%
2.8	Beban Lainnya	1.760.498.926.153	1.310.775.667.330	34,31%
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	15.688.041.965.458	10.399.037.336.468	50,86%
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	15.688.041.965.458	10.399.037.336.468	50,86%
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN:				
3.1	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	12.389.216.807.435	8.399.940.201.779	47,49%
3.1.1	Aset Tetap	12.209.478.411.971	8.003.009.817.556	52,56%
3.1.2	Perubahan Persediaan	-	-	0,00%
3.1.3	Barang Berharga	-	-	0,00%
3.1.4	Aset Non Produksi	179.738.395.464	396.930.384.223	-54,72%
NLB	Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	3.298.825.158.023	1.999.097.134.689	65,02%
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN):				
3.2	Akuisisi Neto Aset Keuangan	3.126.672.742.395	1.864.115.997.517	67,73%
3.2.1	Dalam Negeri	3.126.672.742.395	1.864.115.997.517	67,73%
3.2.2	Luar Negeri	-	-	0,00%
3.3	Keterjadian Kewajiban Neto	(172.152.415.628)	(134.981.137.172)	-27,54%
3.3.1	Dalam Negeri	(172.152.415.628)	(134.981.137.172)	-27,54%
3.3.2	Luar Negeri	-	-	0,00%



**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode	Akun Statistik Keuangan Pemerintah	Tahun 2024 (Preliminary)	Tahun 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH:				
1	Pendapatan	36.678.461.290.338	71.106.189.183.386	-48,42%
1.1	Pajak	25.673.998.570.094	25.039.116.932.950	2,54%
1.2	Kontribusi Sosial	-	-	0,00%
1.3	Hibah	5.508.434.649.067	158.252.444.092	3380,79%
1.4	Pendapatan Lainnya	5.496.028.071.177	45.908.819.806.344	-88,03%
2	Beban	37.913.319.043.233	36.634.321.672.768	3,49%
2.1	Kompensasi Pegawai	14.441.301.127.154	12.972.239.107.532	11,32%
2.2	Penggunaan Barang dan Jasa	15.944.807.225.493	13.283.611.872.158	20,03%
2.3	Konsumsi Aset Tetap	-	-	0,00%
2.4	Bunga	11.523.137.245	21.667.483.262	-46,82%
2.5	Subsidi	2.016.944.231	1.398.782.820	44,19%
2.6	Hibah	5.413.053.738.794	8.255.966.043.322	-34,43%
2.7	Manfaat Sosial	283.427.261.163	220.409.044.036	28,59%
2.8	Beban Lainnya	1.817.189.609.153	1.879.029.339.638	-3,29%
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	(1.234.857.752.895)	34.471.867.510.618	-103,58%
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	(1.234.857.752.895)	34.471.867.510.618	-103,58%
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN :				
3.1	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	14.213.633.932.195	9.775.759.608.658	45,40%
3.1.1	Aset Tetap	13.353.222.489.341	9.372.255.473.341	42,48%
3.1.2	Perubahan Persediaan	671.358.891.967	-	100,00%
3.1.3	Barang Berharga	-	-	0,00%
3.1.4	Aset Non Produksi	189.052.550.887	403.504.135.317	-53,15%
NLB	Saldo Peminjaman/Pinjaman Neto (1-2+NOBz-31)	(15.448.491.685.090)	24.696.107.901.960	-162,55%
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN):				
3.2	Akuisisi Neto Aset Keuangan	(15.620.644.100.718)	24.561.126.764.788	-163,60%
3.2.1	Dalam Negeri	(15.620.644.100.718)	24.561.126.764.788	-163,60%
3.2.2	Luar Negeri	-	-	0,00%
3.3	Keterjadian Kewajiban Neto	(172.152.415.628)	(134.981.137.172)	-27,54%
3.3.1	Dalam Negeri	(172.152.415.628)	(134.981.137.172)	-27,54%
3.3.2	Luar Negeri	-	-	0,00%



**NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Uraian	31 Desember 2024 (Preliminary)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
6	KEKAYAAN BERSIH	52.080.796.514.980	48.484.882.702.373	7,42%
61	Aset Non Keuangan	48.450.346.366.435	46.472.746.334.696	4,26%
611	Aset Tetap	16.604.099.738.755	15.472.845.890.956	7,31%
6111	Gedung dan Bangunan	14.311.956.183.249	13.600.048.532.516	5,23%
6112	Peralatan dan Mesin	1.653.329.546.762	1.497.596.678.067	10,40%
6113	Aset Tetap Lainnya	638.814.008.744	375.200.680.373	70,26%
612	Persediaan	1.509.750.837.760	1.436.187.935.468	5,12%
614	Aset Non Produksi	30.336.495.789.920	29.563.712.508.272	2,61%
6141	Tanah	30.315.877.430.074	29.557.887.080.147	2,56%
6145	Aset tak Berwujud	20.618.359.846	5.825.428.125	253,94%
62	Aset Keuangan	4.111.003.676.641	3.268.140.104.848	25,79%
6202	Uang dan Deposito	1.116.697.941.199	905.188.428.670	23,37%
6203	Surat Berharga Selain Saham	59.000.000.000	56.000.000.000	5,36%
6204	Pinjaman	-	-	0,00%
6205	Saham dan Ekuitas Lain	-	-	0,00%
6208	Piutang Lainnya	2.935.305.735.442	2.306.951.676.178	27,24%
621	Aset Keuangan Domestik	4.111.003.676.641	3.268.140.104.848	25,79%
6222	Uang dan Deposito	1.116.697.941.199	905.188.428.670	23,37%
6223	Surat Berharga Selain Saham	59.000.000.000	56.000.000.000	5,36%
6224	Pinjaman	-	-	0,00%
6225	Saham dan Ekuitas Lain	-	-	0,00%
6228	Piutang Lainnya	2.935.305.735.442	2.306.951.676.178	27,24%
622	Aset Keuangan Luar Negeri	-	-	0,00%
6222	Uang dan Deposito	-	-	0,00%
6223	Surat berharga Selain Saham	-	-	0,00%
6224	Pinjaman	-	-	0,00%
6225	Saham dan Ekuitas Lain	-	-	0,00%
6228	Piutang Lainnya	-	-	0,00%
63	Kewajiban	480.553.528.096	1.256.003.737.171	-61,74%
6303	Surat Berharga Selain Saham	-	-	0,00%
6304	Pinjaman	-	-	0,00%
6308	Utang Lainnya	480.553.528.096	1.256.003.737.171	-61,74%
631	Kewajiban Domestik	480.553.528.096	1.256.003.737.171	-61,74%
6313	Surat Berharga selain saham	-	-	0,00%
6314	Pinjaman	-	-	0,00%
6318	Utang Lainnya	480.553.528.096	1.256.003.737.171	-61,74%



No	Uraian	31 Desember 2024 (Preliminary)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
632	Kewajiban Luar Negeri	-	-	0,00%
6323	Surat Berharga selain saham	-	-	0,00%
6324	Pinjaman	-	-	0,00%
6328	Utang Lainnya	-	-	0,00%



**NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Uraian	31 Desember 2024 (Preliminary)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
6	KEKAYAAN BERSIH	90.875.404.026.958	79.682.100.032.284	14,05%
61	Aset Non Keuangan	74.917.615.909.534	66.977.198.488.465	11,86%
611	Aset Tetap	55.013.363.882.220	47.252.685.078.030	16,42%
6111	Gedung dan Bangunan	41.298.639.367.318	34.771.195.521.869	18,77%
6112	Peralatan dan Mesin	4.574.403.387.255	3.501.969.102.542	30,62%
6113	Aset Tetap Lainnya	9.140.321.127.647	8.979.520.453.619	1,79%
612	Persediaan	646.134.648.650	646.134.648.650	0,00%
614	Aset Non Produksi	19.258.117.378.664	19.078.378.761.785	0,94%
6141	Tanah	19.257.002.440.699	19.077.264.045.235	0,94%
6145	Aset tak Berwujud	1.114.937.965	1.114.716.550	0,02%
62	Aset Keuangan	18.079.015.831.032	14.998.281.673.055	20,54%
6202	Uang dan Deposito	9.373.183.589.518	7.229.229.839.907	29,66%
6203	Surat Berharga Selain Saham	619.453.134	619.453.134	0,00%
6204	Pinjaman	-	-	0,00%
6205	Saham dan Ekuitas Lain	6.332.706.977.229	5.396.128.630.558	17,36%
6208	Piutang Lainnya	2.372.505.811.151	2.372.303.749.456	0,01%
621	Aset Keuangan Domestik	18.079.015.831.032	14.998.281.673.055	20,54%
6222	Uang dan Deposito	9.373.183.589.518	7.229.229.839.907	29,66%
6223	Surat Berharga Selain Saham	619.453.134	619.453.134	0,00%
6224	Pinjaman	-	-	0,00%
6225	Saham dan Ekuitas Lain	6.332.706.977.229	5.396.128.630.558	17,36%
6228	Piutang Lainnya	2.372.505.811.151	2.372.303.749.456	0,01%
622	Aset Keuangan Luar Negeri	-	-	0,00%
6222	Uang dan Deposito	-	-	0,00%
6223	Surat berharga Selain Saham	-	-	0,00%
6224	Pinjaman	-	-	0,00%
6225	Saham dan Ekuitas Lain	-	-	0,00%
6228	Piutang Lainnya	-	-	0,00%
63	Kewajiban	2.121.227.713.608	2.293.380.129.236	-7,51%
6303	Surat Berharga Selain Saham	-	-	0,00%
6304	Pinjaman	80.094.097.102	252.246.512.730	-68,25%
6308	Utang Lainnya	2.041.133.616.506	2.041.133.616.506	0,00%
631	Kewajiban Domestik	2.121.227.713.608	2.293.380.129.236	-7,51%
6313	Surat Berharga selain saham	-	-	0,00%
6314	Pinjaman	80.094.097.102	252.246.512.730	-68,25%
6318	Utang Lainnya	2.041.133.616.506	2.041.133.616.506	0,00%



No	Uraian	31 Desember 2024 (Preliminary)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
632	Kewajiban Luar Negeri	-	-	0,00%
6323	Surat Berharga selain saham	-	-	0,00%
6324	Pinjaman	-	-	0,00%
6328	Utang Lainnya	-	-	0,00%



**NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KANWIL: DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No	Uraian	31 Desember 2024 (Preliminary)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
6	KEKAYAAN BERSIH	142.956.200.541.938	128.166.982.734.657	11,54%
61	Aset Non Keuangan	123.367.962.275.969	113.449.944.823.161	8,74%
611	Aset Tetap	71.617.463.620.975	62.725.530.968.986	14,18%
6111	Gedung dan Bangunan	55.610.595.550.567	48.371.244.054.385	14,97%
6112	Peralatan dan Mesin	6.227.732.934.017	4.999.565.780.609	24,57%
6113	Aset Tetap Lainnya	9.779.135.136.391	9.354.721.133.992	4,54%
612	Persediaan	2.155.885.486.410	2.082.322.584.118	3,53%
614	Aset Non Produksi	49.594.613.168.584	48.642.091.270.057	1,96%
6141	Tanah	49.572.879.870.773	48.635.151.125.382	1,93%
6145	Aset tak Berwujud	21.733.297.811	6.940.144.675	213,15%
62	Aset Keuangan	21.539.449.767.099	17.615.852.037.329	22,27%
6202	Uang dan Deposito	10.489.881.530.717	8.134.418.268.577	28,96%
6203	Surat Berharga Selain Saham	59.619.453.134	56.619.453.134	5,30%
6204	Pinjaman	-	-	0,00%
6205	Saham dan Ekuitas Lain	6.332.706.977.229	5.396.128.630.558	17,36%
6208	Piutang Lainnya	4.657.241.806.019	4.028.685.685.060	15,60%
621	Aset Keuangan Domestik	21.539.449.767.099	17.615.852.037.329	22,27%
6222	Uang dan Deposito	10.489.881.530.717	8.134.418.268.577	28,96%
6223	Surat Berharga Selain Saham	59.619.453.134	56.619.453.134	5,30%
6224	Pinjaman	-	-	0,00%
6225	Saham dan Ekuitas Lain	6.332.706.977.229	5.396.128.630.558	17,36%
6228	Piutang Lainnya	4.657.241.806.019	4.028.685.685.060	15,60%
622	Aset Keuangan Luar Negeri	-	-	0,00%
6222	Uang dan Deposito	-	-	0,00%
6223	Surat berharga Selain Saham	-	-	0,00%
6224	Pinjaman	-	-	0,00%
6225	Saham dan Ekuitas Lain	-	-	0,00%
6228	Piutang Lainnya	-	-	0,00%
63	Kewajiban	1.951.211.501.130	2.898.814.125.833	-32,69%
6303	Surat Berharga Selain Saham	-	-	0,00%
6304	Pinjaman	80.094.097.102	252.246.512.730	-68,25%
6308	Utang Lainnya	1.871.117.404.028	2.646.567.613.103	-29,30%
631	Kewajiban Domestik	1.951.211.501.130	2.898.814.125.833	-32,69%
6313	Surat Berharga selain saham	-	-	0,00%
6314	Pinjaman	80.094.097.102	252.246.512.730	-68,25%
6318	Utang Lainnya	1.871.117.404.028	2.646.567.613.103	-29,30%



No	Uraian	31 Desember 2024 (Preliminary)	31 Desember 2023 (Audited)	Kenaikan/ Penurunan
632	Kewajiban Luar Negeri	-	-	0,00%
6323	Surat Berharga selain saham	-	-	0,00%
6324	Pinjaman	-	-	0,00%
6328	Utang Lainnya	-	-	0,00%



METADATA

A. Informasi Data

Nama Data	: Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah
Penyelenggara Statistik	: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
Alamat	: Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No.24 Banjarmasin
Nomor Telepon	: (0511) 3354224, 3354226, 3351563
Nomor Faksimili	: (0511) 3354834
Email	: aklapbjm@gmail.com

B. Definisi Data

Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah merupakan Laporan Statistik Keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan selama suatu periode berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik seperti Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts-SNA*), Manual Neraca Pembayaran (*The Balance of Payments Manual*), Manual Statistik Moneter dan Keuangan (*The Monetary and Financial Statistics Manual*).

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah-Tingkat Wilayah (LSKP-TW) ini merupakan konsolidasi dari kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat-Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) dan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah-Tingkat Wilayah (LSKPD-TW). Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan ini adalah entitas Pemerintah Pusat tingkat wilayah dan seluruh Pemerintah Daerah.

LSKP-TW disusun terdiri dari:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintahan
 2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintahan
 3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah*
 4. Laporan Arus Ekonomi Lainnya*
 5. Metadata
- *) Penyusunan GFS Tahunan

C. Cakupan Data

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah meliputi:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resipokal dan akun skala resipokal pada kolom konsolidasi.
2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil konsolidasi Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resipokal dan skala resipokal pada kolom konsolidasi.
3. Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Tingkat Wilayah yang merupakan hasil konsolidasian Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resipokal dan skala resipokal pada kolom konsolidasi.



4. Laporan Arus Ekonomi Lainnya Pemerintah Tingkat Wilayah yang merupakan hasil konsolidasi Laporan Arus Ekonomi Lainnya Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Arus Ekonomi Lainnya Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

D. Periode Publikasi

Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan. Publikasi ini merupakan publikasi periode *Preliminary* Tahun 2024.

E. Waktu Publikasi

1. Data Triwulanan dan Semesteran diterbitkan satu bulan setelah berakhirnya periode data.
2. Data Tahunan *Unaudited* diterbitkan tanggal 20 April tahun berikutnya.
3. Data Tahunan Final (*Audited*) diterbitkan tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.

F. Status Data

1. Status Angka Sangat Sementara dengan tanda dua bintang (**) diberikan apabila:
 - a. LSKP-TW Triwulanan dan Semesteran pada tahun berjalan yang disusun menggunakan angka estimasi.
2. Status Angka Sangat Sementara dengan tanda satu bintang (*) diberikan apabila:
 - a. LSKP-TW Triwulanan dan Semesteran pada tahun berjalan yang telah dilakukan *updating*.
 - b. LSKP-TW Tahunan dengan data *unaudited*.
 - c. LSKP-TW Tahunan yang belum seluruhnya disusun dengan data *audited*.
3. LSKP-TW Tahunan berstatus angka tetap (tanpa tanda bintang) apabila telah seluruhnya disusun menggunakan data laporan keuangan yang telah diaudit.

G. Sumber Data

1. Kertas kerja LSKPP-TW dan kertas kerja LSKPDK-TW di-*download* dari Aplikasi SIKRI MP dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Penyusunan LO LSKP data Table GFS 1 (*Revenue*), Table GFS 2 (*Expense*), dan Tabel GFS 3 (*Transactions in Assets in Liabilities*). Terdapat penyesuaian pada Table GFS 3 yaitu dengan menghapus eliminasi pada *Currency and Deposits* (3212).
 - b. Penyusunan Neraca LSKP menggunakan Table GFS 6 (*Balance Sheet*).
2. Kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPDK-TW diunduh dari Aplikasi SIKRI MP per tanggal 22 Februari 2025. Penyusunan LO LKPDK dan Neraca LKPDK dilakukan dengan melakukan estimasi dari data LRA tahun berjalan dan Neraca TAYL.
3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) per objek Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kalimantan Selatan *Preliminary* Tahun 2024 diperoleh langsung dari Pemerintah Daerah. Sedangkan Belanja LRA per fungsi didapatkan langsung dari Pemerintah Daerah dan estimasi. Estimasi realisasi Belanja LRA per fungsi dilakukan terhadap pemda yang belum dapat menghasilkan LRA per fungsi karena aplikasi pelaporan yang belum mengakomodasi penyusunan laporan tersebut. Adapun rincian sumber data LRA LKPD yang digunakan dalam penyusunan GFS *Preliminary* Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

No.	Kode	Pemerintah Daerah	Sumber Data	
			LRA per Objek	LRA per Fungsi
1	1500	Provinsi Kalimantan Selatan	Pemda	Estimasi
2	1501	Kab Banjar	Pemda	Pemda



No.	Kode	Pemerintah Daerah	Sumber Data	
			LRA per Objek	LRA per Fungsi
3	1502	Kab Tanah Laut	Pemda	Pemda
4	1503	Kab Tapin	Pemda	Pemda
5	1504	Kab Hulu Sungai Selatan	Pemda	Pemda
6	1505	Kab Hulu Sungai Tengah	Pemda	Pemda
7	1506	Kab Barito Kuala	Pemda	Pemda
8	1507	Kab Tabalong	Pemda	Pemda
9	1508	Kab Kotabaru	Pemda	Pemda
10	1509	Kab Hulu Sungai Utara	Pemda	Pemda
11	1510	Kab Tanah Bumbu	Pemda	Pemda
12	1511	Kab Balangan	Pemda	Pemda
13	1551	Kota Banjarmasin	Pemda	Pemda
14	1552	Kota Banjarbaru	Pemda	Pemda

H. Metodologi

LSKP-TW disusun dengan mengonsolidasikan kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW. LSKPPTW dan LSKPDK-TW disusun dengan melakukan *mapping* BAS detail kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPD-TW menggunakan Kertas Kerja *Classification Assistance* yang berupa kertas kerja Ms. Excel yang menyediakan kerangka *mapping* masing-masing akun BAS detail ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah. Eliminasi atas transaksi resipokal melalui jurnal manual yang diunggah melalui WebADI pada SIKRI MP. Aplikasi SIKRI MP akan secara otomatis melakukan penyusunan LSKP-TW dengan mengonsolidasikan kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW ke dalam GFS *Table* sesuai dengan kerangka *mapping* masing-masing akun BAS detail ke dalam BAS Statistik Keuangan Pemerintah.

LSKP-TW disusun melalui tiga tahapan, yaitu.

1. Penyusunan kertas kerja LSKPP-TW melalui *mapping* BAS detail data LKPP-TW.
2. Penyusunan kertas kerja LSKPDK-TW, melalui *mapping* BAS detail data LKPD-TW.
3. Konsolidasian kertas kerja LSKPP-TW dengan kertas kerja LSKPDK-TW menjadi LSKP-TW.

I. Integritas Data

1. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah *Preliminary* Tahun 2024 diperoleh dari Aplikasi SIKRI MP. Data Laporan Keuangan terdiri dari 550 UAKPA yang berada pada lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (sumber: MonSAKTI).
2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah *Preliminary* Tahun 2024 dilakukan proses konsolidasi terhadap 14 LKPD Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Pemutakhiran data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.

J. Akses Data

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dapat diperoleh pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan D. I. Panjaitan Nomor 24 Banjarmasin. Sementara itu, Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Nasional dapat diperoleh pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat.



ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN ANALISIS INDIKATOR FISKAL PADA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PRELIMINARY TAHUN 2024

A. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah

1. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	Rasio solvabilitas jangka pendek pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada 31 Desember 2024 adalah sebesar 957,27% yang berarti kemampuan pemerintah konsolidasian dalam memenuhi setiap Rp100 kewajiban jangka pendeknya dijamin dengan Rp957 aset lancar. Apabila dibandingkan dengan 31 Desember Tahun 2023, rasio solvabilitas adalah sebesar 473,63%. Peningkatan tingkat rasio solvabilitas jangka pendek lingkup wilayah Kalimantan Selatan terjadi pada Pemerintah Daerah yang disebabkan adanya peningkatan nilai aset lancar seiring dengan penurunan nilai kewajiban jangka pendek. Seluruh Pemda lingkup Kalimantan Selatan memiliki rasio solvabilitas jangka pendek di atas 100%, kecuali Kab. Tapin dan Kota Banjarmasin. Hal ini terjadi karena kesediaan kas daerah yang tidak mencukupi untuk penyelesaian kewajiban jangka pendek pada tahun 2023 (nilai neraca 31 Desember 2024 merupakan estimasi dari posisi neraca per 31 Desember 2023).
2.	Rasio Solvabilitas Jangka Panjang	Rasio solvabilitas jangka panjang pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada 31 Desember 2024 adalah sebesar 43.047,90% yang berarti kemampuan pemerintah konsolidasian dalam memenuhi setiap Rp100 Kewajiban Jangka Panjang dijamin dengan Rp43.047 aset. Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2024 lingkup wilayah Kalimantan Selatan hanya terdapat pada Kab. Tapin sebesar Rp2.941.558.627 dan Kab. Tabalong sebesar Rp45.267.445.902.

2. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	<p>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 18,15% dan 21,06%. Hal tersebut mencerminkan bahwa tingkat kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat masih termasuk kategori kurang (<i>range</i> 10% s.d. 20%). Pemerintah perlu mengoptimalkan PAD dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah, serta meningkatkan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang merupakan komponen utama pembentuk PAD. Penurunan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Tahun 2024 juga disebabkan karena peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang tidak sebesar peningkatan Pendapatan Transfer. Pos Pajak Daerah menjadi kontributor terbesar PAD pada Tahun 2024.</p> <p>Berdasarkan kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah, tingkat kemandirian daerah Tahun 2024 masuk dalam kategori "kurang" (<i>range</i> 10% s.d. 20%) dan Tahun 2023 masuk dalam kategori "sedang" (<i>range</i> 21% s.d. 30%). Pada Tahun</p>



No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
		<p>2024, terdapat 8 pemda dengan rasio kemandirian keuangan daerah kategori “sangat kurang”, 4 pemda dengan rasio kemandirian keuangan daerah “kurang”, 1 pemda dengan rasio kemandirian daerah kategori “sedang”, dan 1 pemda dengan rasio kemandirian keuangan daerah kategori “baik”.</p> <p>Pemda dengan kategori “baik” (<i>range</i> 40% s.d. 50%) adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini disebabkan oleh PAD Provinsi Kalimantan Selatan yang tinggi karena ditopang oleh jenis pajak yang memiliki volume dan nilai transaksi besar yang berada dalam wewenang pemerintah provinsi, yaitu Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).</p>
2.	Rasio Solvabilitas Anggaran	<p>Rasio Solvabilitas Anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 140,85% dan 126,70%. Hal tersebut mencerminkan bahwa Pendapatan Pemerintah Daerah mampu membiayai belanja Pemerintah selama periode anggaran. Peningkatan tipis Rasio Solvabilitas Anggaran disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan Daerah setelah dikurangi Pendapatan Transfer DAK pada Tahun 2024.</p> <p>Peningkatan PAD pada Tahun 2024 utamanya disumbang oleh Pajak Daerah. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di tingkat provinsi dan Pajak Penerangan Jalan untuk di tingkat kabupaten/kota. Untuk itu, diperlukan upaya optimalisasi pendapatan, khususnya Pajak Daerah sehingga dapat memperkecil tingkat ketergantungan pada pendapatan transfer. Pendapatan Retribusi juga tercatat meningkat signifikan, terutama dari pos Retribusi Pelayanan Kesehatan sehingga dapat menjadi fokus optimalisasi penerimaan retribusi selanjutnya.</p> <p>Rasio Solvabilitas Anggaran pada Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 memiliki nilai lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah dapat membiayai Belanja Daerah selama periode anggaran.</p>
3.	Rasio Solvabilitas Layanan	<p>Rasio Solvabilitas Layanan Provinsi Kalimantan Selatan <i>Preliminary</i> Tahun 2024 menunjukkan angka 11.210.172. Artinya, untuk setiap kebutuhan pelayanan menurut fungsi dan jenis pelayanan yang akan diterima per 1 orang penduduk di wilayah layanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dapat dipenuhi atau dijamin dengan nilai aset yang digunakan untuk pelayanan publik senilai Rp11.210.172. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat menyediakan fasilitas atau proses pelayanan publik yang setara dengan nilai aset Pemda sebesar Rp11.210.172 untuk setiap penduduk yang ada di wilayah layanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Rasio Solvabilitas Layanan Tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 9.873.490. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya nilai aset pemerintah daerah, sementara jumlah penduduk yang dilayani relatif sama dengan tahun sebelumnya.</p>
4.	Rasio Solvabilitas Operasional	<p>Rasio Solvabilitas Operasional pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 117,41% dan 110,68%. Hal tersebut mencerminkan bahwa pada Tahun 2024, pendapatan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah telah mampu membiayai belanja operasional.</p>



No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
		<p>Penurunan Rasio Solvabilitas Operasional pada Tahun 2024 terjadi kenaikan karena terdapat peningkatan pendapatan LO yang lebih besar daripada peningkatan beban LO. Sebagai catatan, nilai pendapatan adalah pendapatan sebelum dilakukan eliminasi dengan transaksi resiprokal.</p> <p>Seluruh pemda lingkup Kalimantan Selatan memiliki nilai Solvabilitas Operasional di atas 100% pada Tahun 2024, kecuali Kab. Banjar sebesar 93,26%, Kab. Hulu Sungai Selatan sebesar 95,91%, Kab. Hulu Sungai Tengah sebesar 88,91%, dan Kab. Barito Kuala sebesar 82,04%.</p>
5.	Rasio Fleksibilitas Keuangan	<p>Rasio Fleksibilitas Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 16,85% dan 10,07%. Nilai Rasio Fleksibilitas Keuangan yang bernilai positif pada Tahun 2024 mencerminkan bahwa pendapatan yang dikumpulkan setelah dikurangi DAK telah mencukupi untuk pembayaran beban operasional dan pembayaran pokok kewajiban.</p> <p>Terdapat 4 (empat) Pemerintah Daerah yang memiliki nilai Rasio Fleksibilitas Keuangan negatif, yaitu Kab. Banjar sebesar 6,74%, Kab. Hulu Sungai Selatan sebesar 4,09%, Kab. Hulu Sungai Tengah sebesar 11,09%, dan Kab. Barito Kuala sebesar 17,96%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah setelah dikurangi dengan pendapatan DAK belum mencukupi untuk pembayaran beban operasional. Optimalisasi PAD perlu menjadi fokus utama Pemerintah Daerah untuk kesinambungan fiskal yang terjaga, utamanya dalam menghadapi risiko ketidakpastian global yang mempengaruhi penerimaan utama dari sebagian besar pemda di Kalimantan Selatan, yaitu sumber daya alam berupa baru bara dan sawit.</p> <p>Sebagai catatan, nilai pendapatan adalah pendapatan sebelum dilakukan eliminasi dengan transaksi resiprokal.</p>

B. Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

1. Analisis Keseimbangan Fiskal

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Keseimbangan Operasi Neto (<i>Net Operating Balance</i>)	<p>Kekayaan selama transaksi berjalan menunjukkan nilai minus Rp1.234.857.752.895. Nilai Keseimbangan Operasi Neto mengalami penurunan signifikan sebesar Rp35.706.725.263.513 atau 103,58% dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp34.471.867.510.618.</p> <p>Penurunan keseimbangan operasi netto tersebut terjadi pada tingkatan Pemerintah Pusat. Kondisi tersebut terjadi karena penurunan Pendapatan yang disebabkan oleh dikeluarkannya <i>dropping</i> dana transfer dari penghitungan Pendapatan Lainnya.</p>
2.	Keseimbangan Operasi Bruto (<i>Gross Operating Balance</i>)	<p>Nilai Keseimbangan Operasi Bruto pada LO Statistik Tahun 2024 sama dengan nilai Keseimbangan Operasi Neto. Nilai NOB mencakup semua beban, sedangkan nilai GOB tidak memperhitungkan Konsumsi Aset Tetap. Namun, saat ini komponen pembentuk Laporan Operasional Statistik adalah Laporan Realisasi Anggaran sehingga tidak mencatat konsumsi aset tetap. Hal ini juga yang mendasari dikeluarkannya <i>dropping</i></p>



No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
		dana transfer dari penghitungan Pendapatan Lainnya karena pos tersebut merupakan akun penyesuaian akrual.
3.	Peminjaman/Pinjaman Neto (<i>Net Lending/Borrowing</i>)	<p>Nilai <i>Net Lending</i> Tahun 2024 pada LO Statistik menunjukkan nilai minus Rp15.448.491.685.090. Nilai <i>Net Lending</i> tersebut mengalami penurunan sebesar Rp40.144.599.587.050 atau 162,55% dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp24.696.107.901.960. Penurunan nilai <i>Net Lending</i> dibandingkan tahun sebelumnya terjadi pada seluruh tingkatan Pemerintah Pusat.</p> <p><i>Net Lending</i> menggambarkan seberapa besar sumber daya finansial yang mampu disalurkan maupun diperoleh dari sektor ekonomi lain (pembiayaan). Nilai <i>Net Lending</i> pada seluruh tingkatan pemerintahan dilakukan optimalisasi melalui pembiayaan yaitu melalui Akuisisi Aset Keuangan Neto sebesar Rp15.620.644.100.718 dan membayar pokok pinjaman (Keterjadian Kewajiban Neto) sebesar Rp172.152.415.628.</p>
4.	Keseimbangan Operasi Primer (<i>Primary Operating Balance</i>)	<p>Nilai Keseimbangan Operasi Primer Tahun 2024 pada LO Statistik menunjukkan nilai minus Rp1.223.334.615.650. Nilai Keseimbangan Operasi Primer minus terjadi pada seluruh tingkatan Pemerintah Pusat. Sementara itu, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki Keseimbangan Operasi Primer positif yang menandakan pemerintah daerah mampu membiayai seluruh beban operasi sehingga kesinambungan fiskal tetap terjaga. Namun demikian, secara konsolidasian Pemerintah Umum masih membutuhkan pembiayaan untuk mendanai beban operasional.</p>
5.	Keseimbangan Primer (<i>Primary Balance</i>)	<p>Nilai Keseimbangan Primer Tahun 2024 pada LO Statistik menunjukkan nilai minus Rp15.436.968.547.845. Keseimbangan Primer Pemerintah Umum bernilai negatif tersebut dipengaruhi oleh nilai Keseimbangan Primer Pemerintah Pusat yang bernilai negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tingkatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mampu membiayai seluruh pengeluaran dan mampu memenuhi kewajiban pembayaran atas <i>interest expense</i> tanpa menimbulkan utang yang baru.</p>

2. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Pajak Langsung (<i>Direct Taxes</i>)	<p>Pajak Langsung (<i>Direct Taxes</i>) pada lingkup Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp9.604.135.948.087. Pajak Langsung sebagian besar berupa <i>Taxes on income, profits, and capital gain</i> atau Pajak Penghasilan yang pemungutannya merupakan kewenangan pada Pemerintah Pusat.</p> <p>Pajak Langsung (<i>Direct Taxes</i>) mengalami peningkatan pada Tahun 2024 sebesar Rp1.024.853.200.786 atau 11,95 % dibanding Tahun 2023 yaitu sebesar Rp8.579.282.747.301.</p>
2.	Pajak Tidak Langsung (<i>Indirect Taxes</i>)	<p>Pajak Tidak Langsung (<i>Indirect Taxes</i>) pada lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp13.213.591.432.709. Pajak Tidak Langsung mengalami penurunan tipis sebesar Rp195.600.171.759 atau 1,46% dibandingkan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp13.409.191.604.468. Pajak Tidak Langsung (<i>Indirect Taxes</i>) sebagian besar berupa <i>Taxes on Good Services</i> yaitu mencapai 94,88% dari total Pajak Tidak Langsung.</p>



No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
		Pajak Tidak Langsung pada Pemerintah Pusat didominasi oleh PPN Dalam Negeri, pada Pemerintah Provinsi didominasi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak pada Pemkab/Pemkot didominasi oleh Pajak Penerangan Jalan. Pendapatan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami peningkatan seiring dengan penerapan tarif PPN 11%.
3.	Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>)	Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>) pada lingkup Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp0. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp210.779.565.554 atau 100,00% dibandingkan Tahun 2023. Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>) pada Tahun 2023 terdapat pada tingkatan Pemerintah Kabupaten/Kota berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada penyusunan Tahun 2024 <i>Preliminary</i> , terdapat perubahan <i>mapping</i> BPHTB dari akun 1135 (<i>Other noncurrent Taxes on Property</i>) ke akun 1136 (<i>Other recurrent taxes on property</i>) sehingga nilai Pajak Modal menjadi Rp0.
4.	Belanja Konsumsi Final Pemerintah (<i>Government Final Consumption Expenditure</i>)	<p>Belanja Konsumsi Final Pemerintah pada lingkup Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp28.626.152.691.126 yang mengalami kenaikan sebesar Rp4.131.596.496.876 atau 16,87% dibandingkan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp24.494.556.194.250.</p> <p>Apabila melihat komponen pembentuk Belanja Konsumsi Final Pemerintah, peningkatan terbesar ada pada komponen <i>Use of Goods and Services</i>. Peningkatan <i>Use of Goods and Services</i> terjadi karena meningkatnya Belanja Barang Jasa di seluruh tingkatan pemerintahan.</p>
5.	Tabungan Bruto (<i>Gross Saving</i>)	Tabungan Bruto (<i>Gross Saving</i>) pada lingkup Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar minus Rp119.524.744.682 yang mengalami penurunan sebesar Rp34.841.213.046.128 atau 100,34% dibandingkan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp34.721.688.301.446. Tabungan Bruto pada tingkatan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bernilai positif, namun tingkatan Pemerintah Pusat bernilai negatif sehingga mempengaruhi nilai Tabungan Bruto pada Pemerintahan Umum.

3. Analisis Indikator Pembiayaan

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Total Pembiayaan (<i>Total Financing</i>)	<p>Total Pembiayaan (<i>Total Financing</i>) atau <i>Net Lending</i> Tahun 2024 pada LO Statistik menunjukkan nilai minus Rp15.448.491.685.090. Dengan demikian, nilai <i>Total Financing</i> mengalami penurunan sebesar Rp40.144.599.587.050 atau 162,55% dibandingkan dengan Tahun 2023 yaitu sebesar Rp24.696.107.901.960. Penurunan nilai Total Pembiayaan dibandingkan tahun sebelumnya terjadi hanya pada tingkatan Pemerintah Pusat.</p> <p><i>Total Financing</i> tersebut pada seluruh tingkatan pemerintahan dilakukan optimalisasi melalui pembiayaan, yaitu melalui Akuisisi Aset Keuangan Neto sebesar Rp15.620.644.100.718 dan Keterjadian Kewajiban Neto sebesar minus Rp172.152.415.628. Nilai Keterjadian Neto yang minus menunjukkan pembayaran pokok pinjaman.</p>
2.	Pembiayaan Dalam Negeri (<i>Domestic Financing</i>)	Pembiayaan Dalam Negeri (<i>Domestic Financing</i>) merupakan bentuk dari upaya optimalisasi <i>Net Lending</i> (<i>Net Borrowing</i>). Pada Tahun 2024, <i>Net Lending</i> sebesar minus Rp15.448.491.685.090 merupakan Transaksi Aset Keuangan



No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
		dengan unit institusi residen dikurangi kewajiban dengan unit institusi residen yang seluruhnya bersumber dari debitur/kreditur dalam negeri.
3.	Pembiayaan Luar Negeri (<i>Foreign Financing</i>)	Seluruh pembiayaan yang terjadi pada wilayah Kalimantan Selatan merupakan Pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri. Pembiayaan melalui luar negeri hanya dilakukan pada level BA-BUN yang diteruskanpinjamkan kepada Pemerintah Daerah.

4. Analisis Indikator Kekayaan dan Utang

No.	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>)	Jumlah Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>) pada wilayah Kalimantan Selatan adalah sebesar Rp2.601.781.241.704. Utang tersebut terdapat pada seluruh tingkatan pemerintah dengan nilai terbesar pada tingkatan kabupaten/kota. Sebagian besar Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>) berupa kewajiban jangka pendek.
2.	Utang Neto (<i>Net Debt</i>)	Nilai Utang Neto (<i>Net Debt</i>) pada wilayah Kalimantan Selatan sama dengan nilai Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>), karena pada wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tidak memiliki aset berupa <i>Monetary Gold & Special Drawings</i> . LSKP yang disusun pada level wilayah Kalimantan Selatan saat ini hanya mencakup lingkup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan tidak termasuk korporasi. Sebagai informasi tambahan bahwa <i>Monetary Gold</i> merupakan emas yang dimiliki dan disimpan sebagai aset cadangan oleh otoritas moneter (Bank Indonesia), sedangkan <i>Special Drawings</i> merupakan aset cadangan internasional yang diciptakan oleh IMF dan dialokasikan kepada negara anggotanya untuk melengkapi aset cadangan.



C. Lampiran

1. Perhitungan Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah

a. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	957,27%	473,63%
Aset Lancar	15.489.475.856.241	12.018.781.100.007
Kewajiban Jangka Pendek	1.618.081.086.641	2.537.596.712.562
Rasio Solvabilitas Jangka Panjang	43.047,90%	35.859,38%
Total Aset	143.405.656.083.361	129.530.330.388.826
Kewajiban Jangka Panjang	333.130.414.489	361.217.413.271

b. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

No	Pemerintah Prov/Kab/Kota	Rasio									
		Kemandirian Keuangan Daerah		Solvabilitas Anggaran		Solvabilitas Layanan		Solvabilitas Operasional		Fleksibilitas Keuangan	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
1	Kalimantan Selatan	42,94%	49,22%	147,19%	127,84%	6.183.272	5.331.756	129,24%	114,51%	29,24%	14,51%
2	Kab. Banjar	14,63%	11,77%	118,29%	107,12%	8.286.485	7.711.710	93,26%	99,85%	-6,74%	-0,15%
3	Kab. Tanah Laut	9,20%	9,37%	123,98%	123,12%	16.168.031	14.962.888	102,00%	92,06%	2,00%	-7,94%
4	Kab. Tapin	4,48%	6,38%	130,71%	102,86%	18.564.118	16.963.635	104,91%	97,49%	1,90%	-5,91%
5	Kab. Hulu Sungai Selatan	11,80%	12,18%	117,89%	117,13%	18.980.651	17.872.387	95,91%	97,24%	-4,09%	-2,76%
6	Kab. Hulu Sungai Tengah	12,30%	16,20%	113,60%	111,19%	10.666.902	10.278.977	88,91%	112,35%	-11,09%	12,35%
7	Kab. Barito Kuala	4,19%	6,42%	109,46%	99,75%	9.309.087	9.153.596	82,04%	103,91%	-17,96%	3,91%
8	Kab. Tabalong	9,13%	10,69%	145,14%	137,43%	24.335.873	21.555.031	120,14%	124,64%	19,06%	23,25%
9	Kab. Kotabaru	7,39%	7,98%	151,97%	147,28%	21.276.347	18.313.927	126,84%	133,62%	26,84%	33,62%
10	Kab. Hulu Sungai Utara	8,07%	10,90%	138,01%	111,34%	15.918.307	14.509.082	106,99%	114,33%	0,29%	5,97%
11	Kab. Tanah Bumbu	6,26%	6,18%	172,81%	174,04%	27.062.409	21.507.133	147,82%	130,99%	47,82%	30,99%
12	Kab. Balangan	3,83%	4,96%	167,49%	154,26%	46.523.576	35.022.081	142,94%	101,86%	42,94%	1,86%
13	Kota Banjarmasin	20,20%	23,68%	128,01%	107,67%	10.633.271	10.011.096	107,52%	96,53%	7,52%	-3,47%
14	Kota Banjarbaru	19,31%	25,08%	142,06%	117,35%	14.811.450	13.752.663	110,84%	108,99%	10,84%	8,99%
	Total	18,15%	21,06%	140,85%	126,70%	11.210.172	9.873.490	117,41%	110,68%	16,85%	10,07%



2. Perhitungan Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

a. Analisis Keseimbangan Fiskal

Analisis Keseimbangan Fiskal Tahun 2024

No.	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Keseimbangan Operasi Neto	Keseimbangan Operasi Bruto	Pinjaman Neto	Keseimbangan Operasi Primer	Keseimbangan Primer
1	Pemerintah Pusat	(16.922.899.718.353)	(16.922.899.718.353)	(18.747.316.843.113)	(16.922.899.718.353)	(18.747.316.843.113)
2	Pemerintah Provinsi	4.440.339.072.429	4.440.339.072.429	1.498.712.063.442	4.440.339.072.429	1.498.712.063.442
3	Pemerintah Kab/Kota	11.247.702.893.029	11.247.702.893.029	1.800.113.094.581	11.259.226.030.274	1.811.636.231.826
4	Pemerintah Umum	(1.234.857.752.895)	(1.234.857.752.895)	(15.448.491.685.090)	(1.223.334.615.650)	(15.436.968.547.845)

Analisis Keseimbangan Fiskal Tahun 2023

No.	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Keseimbangan Operasi Neto	Keseimbangan Operasi Bruto	Pinjaman Neto	Keseimbangan Operasi Primer	Keseimbangan Primer
1	Pemerintah Pusat	24.072.830.174.150	24.072.830.174.150	22.697.010.767.271	24.072.830.174.150	22.697.010.767.271
2	Pemerintah Provinsi	2.707.242.306.981	2.707.242.306.981	641.928.050.528	2.707.242.306.981	641.928.050.528
3	Pemerintah Kab/Kota	7.691.795.029.487	7.691.795.029.487	1.357.169.084.161	7.713.462.512.749	1.378.836.567.423
4	Pemerintah Umum	34.471.867.510.618	34.471.867.510.618	24.696.107.901.960	34.493.534.993.880	24.717.775.385.222

b. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya

Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya Tahun 2024

No.	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Pajak Langsung	Pajak Tidak Langsung	Pajak Modal	Belanja Konsumsi Final Pemerintah	Tabungan Bruto
1	Pemerintah Pusat	12.102.367.872.265	8.020.241.216.514	-	6.293.009.504.792	(15.862.893.059.375)
2	Pemerintah Provinsi	-	4.396.994.965.801	-	4.654.992.606.344	4.440.339.072.429
3	Pemerintah Kab/Kota	358.039.265.120	796.355.250.394	-	17.678.150.579.990	11.303.029.242.264
4	Pemerintah Umum	12.460.407.137.385	13.213.591.432.709	-	28.626.152.691.126	(119.524.744.682)

Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya Tahun 2023

No.	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Pajak Langsung	Pajak Tidak Langsung	Pajak Modal	Belanja Konsumsi Final Pemerintah	Tabungan Bruto
1	Pemerintah Pusat	11.321.025.153.139	8.669.027.091.822	-	5.621.592.645.023	24.533.430.530.532
2	Pemerintah Provinsi	-	4.026.293.935.419	-	4.172.091.134.492	2.707.242.306.981
3	Pemerintah Kab/Kota	98.120.609.789	713.870.577.227	210.779.565.554	14.700.872.414.735	7.481.015.463.933
4	Pemerintah Umum	11.419.145.762.928	13.409.191.604.468	210.779.565.554	24.494.556.194.250	34.721.688.301.446



c. Analisis Indikator Pembiayaan

Analisis Indikator Pembiayaan Preliminary Tahun 2024

No.	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Total Pembiayaan	Pembiayaan Dalam Negeri	Pembiayaan Luar Negeri	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri
1	Pemerintah Pusat	(18.747.316.843.113)	(18.747.316.843.113)	-	-	-
2	Pemerintah Provinsi	1.498.712.063.442	1.498.712.063.442	-	-	-
3	Pemerintah Kab/Kota	1.800.113.094.581	1.800.113.094.581	-	-	-
4	Pemerintah Umum	(15.448.491.685.090)	(15.448.491.685.090)	-	-	-

Analisis Indikator Pembiayaan Tahun 2023

No.	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Total Pembiayaan	Pembiayaan Dalam Negeri	Pembiayaan Luar Negeri	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri
1	Pemerintah Pusat	22.697.010.767.271	22.697.010.767.271	-	-	-
2	Pemerintah Provinsi	641.928.050.528	641.928.050.528	-	-	-
3	Pemerintah Kab/Kota	1.357.169.084.161	1.357.169.084.161	-	-	-
4	Pemerintah Umum	24.696.107.901.960	24.696.107.901.960	-	-	-

d. Analisis Indikator Kekayaan dan Utang

Analisis Indikator Kekayaan dan Utang 31 Desember 2024

No.	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Utang Bruto	Utang Neto
1	Pemerintah Pusat	480.553.528.096	480.553.528.096
2	Pemerintah Provinsi	790.775.158.690	790.775.158.690
3	Pemerintah Kab/Kota	1.330.452.554.918	1.330.452.554.918
4	Pemerintah Umum	2.601.781.241.704	2.601.781.241.704

Analisis Indikator Kekayaan dan Utang 31 Desember 2023

No.	Jenis Tingkatan Pemerintahan	Utang Bruto	Utang Neto
1	Pemerintah Pusat	1.256.003.737.171	1.256.003.737.171
2	Pemerintah Provinsi	790.775.158.690	790.775.158.690
3	Pemerintah Kab/Kota	1.502.604.970.546	1.502.604.970.546
4	Pemerintah Umum	3.549.383.866.407	3.549.383.866.407



Ditandatangani secara elektronik
Syafriadi

GOVERNMENT FINANCE STATISTICS

LAPORAN GFS STRATEGIS TINGKAT WILAYAH

TAHUN 2024 *PRELIMINARY*

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN